

2

PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GAS RUMAH KACA

2.1. Profil dan Karakteristik Daerah

Keadaan Geografis

Provinsi Papua terletak antara 2°25'-9 ° lintang selatan dan 130°-14° bujur timur. Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, yang memiliki luas 316.553,07 km² atau 16,70% dari luas Indonesia. Pada tahun 2011, Papua dibagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota.

Bagian utara Papua dibatasi oleh Samudra Pasifik, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

Administrasi Wilayah Pemerintahan

Secara administrasi luas areal, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.1.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.1. Luas daerah dan pembagian daerah administrasi menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Luas Area ^{*)} (Km ²)	Σ Kecamatan ^{**)}	Σ Desa/Kelurahan ^{**)}
Merauke	47.406,90	20	168
Jayawijaya	2.331,19	11	117
Jayapura	14.390,16	19	144
Nabire	4.549,75	14	81
Kepulauan Yapen	4.936,37	14	111
Biak Numfor	13.017,45	19	187
Paniai	20.686,54	10	70
Puncak Jaya	2.446,50	8	67
Mimika	2.300,37	12	85
Boven Digoel	24.665,98	20	112
Mappi	23.178,45	10	137
Asmat	24.687,57	10	175
Yahukimo	15.057,90	51	518
Pegunungan Bintang	14.655,36	34	277
Tolikara	6.149,67	35	514
Sarmi	13.965,58	10	86
Keerom	9.015,03	7	61
Waropen	5.381,47	10	87
Supiori	634,24	5	38
Mamberamo Raya	28.034,86	8	58
Nduga	5.825,22	8	32
Lanny Jaya	3.439,79	10	143
Mamberamo Tengah	3.384,14	5	59
Yalimo	3.658,76	5	27
Puncak	5.618,84	8	80
Dogiyai	4.522,15	10	79
Intan Jaya	9.336,60	5	30
Deiyai	2.325,88	6	37
Kota Jayapura	950,38	5	39
Papua	316.553,10	389	3.619

Sumber : ^{*)} Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua

^{**)} BPS Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, luas wilayah Provinsi Papua berdasarkan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua adalah 316.553,10 km², dengan jumlah kecamatan 389 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan 3.619 desa/kelurahan. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 20 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Supiori, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Kota Jayapura merupakan kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan yang paling sedikit, yaitu 5 kecamatan. Selanjutnya Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Yahukimo, yaitu 518 desa/kelurahan, disusul Kabupaten

LAPORAN AKHIR

Tolikara, yaitu 514 desa/kelurahan. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kabupaten Yalimo, yaitu 27 desa/kelurahan.

Topografi

Wilayah Papua terletak pada ketinggian antara 0-300 meter dari permukaan laut. Puncak Jaya merupakan kabupaten/kota tertinggi dengan ketinggian 2.980 m dpl, sedangkan kota Jayapura merupakan kabupaten/kota terendah, yaitu 4 m dpl. Pembagian wilayah Provinsi Papua berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat diurai dalam empat kelompok yaitu (1) wilayah dengan ketinggian 0—100 meter dpl meliputi luas wilayah 19.380.967 Ha atau 64,39% dari total luas Provinsi Papua. (2) wilayah dengan ketinggian >100—500 meter dpl meliputi luas 3.802.344 Ha atau 12,63%; (3) wilayah dengan ketinggian >500—1000 meter dpl meliputi luas 1.393.600 Ha atau 4,63%, dan (4) wilayah dengan ketinggian >1000 meter dpl meliputi luas 5.520.697 Ha atau 18,34% dari luas total wilayah daratan Provinsi Papua. Secara lengkap tinggi kabupaten/kota dari permukaan laut di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.2.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.2. Tinggi beberapa kota dari permukaan laut menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2011

Kabupaten/Kota	Nama Kota	Tinggi (m)
Merauke	Merauke	10
Jayawijaya	Wamena	1.660
Jayapura	Sentani	99
Nabire	Enarotali	-
Kepulauan Yapen	Mulia	-
Biak Numfor	Nabire	3
Paniai	Timika	-
Puncak Jaya	Serui	13
Mimika	Biak	14
Boven Digoel	Tanah Merah	44
Mappi	Keppi	16
Asmat	Agats	10
Yahukimo	Dekai	*)
Pegunungan Bintang	Oksibil	1.306
Tolikara	Karubaga	*)
Sarmi	Sarmi	11
Keerom	Arso	54
Waropen	Botawa	30
Supiori	Sorendiwari	38
Mamberamo Raya	Burmeso	*)
Nduga	Kenyam	*)
Lanny Jaya	Tiom	*)
Mamberamo Tengah	Kobakma	*)
Yalimo	Elelim	*)
Puncak	Ilaga	*)
Dogiyai	Kigamani	*)
Intan Jaya	Sugapa	*)
Deiyai	Tigi	*)
Kota Jayapura	Jayapura	4

Sumber : Balai Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua, 2011

Catatan : *) Data tidak tersedia

Geologi

Kondisi geologi Pulau Papua yang terletak pada pertemuan lempeng-lempeng bumi aktif menjadikannya kaya potensi, baik berupa sumberdaya alam sekaligus rawan terhadap terjadinya bencana. Struktur geologi ini memanjang relatif barat-timur mulai dari sebagian Pulau Sulawesi, Pulau Maluku sampai Jayapura bagian utara. Jayapura yang sebagian besar morfologinya dikelilingi teluk dan beberapa pulau kecil, menjadikannya terlindung dari terjadinya gempa yang dapat memicu gelombang tsunami. Namun

LAPORAN AKHIR

demikian, akibat dari kompleksitas geologi yang rawan bencana tersebut, terbentuk pula cebakan-cebakan mineral serta minyak dan gas bumi (migas) di beberapa daerah tertentu di Papua. Sementara itu, di daerah Pegunungan Tengah Papua terbentuk deposit mineral-mineral logam seperti emas, tembaga dan aluminium dalam jumlah melimpah.

Tanah

Jenis tanah terdiri dari Laterit Air Tanah, Latosol, Litosol, Mediteran, Organosol, Podsolik, Renzina, dan Tanah Glei. Batuan terdiri dari aluvium, batuan malihan derewo, Konglomerat diawa, formasi auriimi, batu lempung wagopa, formasi unk, formasi kopai, batu gamping yawee, endapan rawa tua, fanglomerat, formasi waripi, endapan rawa muda, endapan rawa tua, formasi awin, formasi kopai, batuan ultamafik, batu gamping umbrug, formasi klasafet, formasi makats, amfibolit.

Hidrologi

Kondisi hidrologi di Provinsi Papua dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yang tersebar di kabupaten/kota yaitu Merauke, Jayapura, dan Biak Numfor. Sungai Digoel merupakan sungai terpanjang kedua yaitu ± 800 km dengan lebar 215-1209 meter dan Sungai Mamberamo merupakan sungai terpanjang yaitu ± 870 Km dengan lebar 175-800 meter. Beberapa sungai besar lainnya seperti Sungai Wapoga, Maro, Mimika, Lorenz, Kaibus Karabra dan lainnya. Di samping potensi sungai sebagai air permukaan juga terdapat air bawah permukaan terdiri dari air tanah dangkal, yaitu galian sumur dan air tanah dalam.

Provinsi Papua memiliki banyak sungai, danau, rawa yang berskala kecil sampai dengan skala besar, adapun beberapa sungai besar sekaligus sebagai sumber mata air di Provinsi Papua, terkait dengan hidrologi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.3. Kondisi hidrologi di Provinsi Papua

Nama Sungai	Sumber Mata Air	Muara
Tami	Pegunungan Cyloop	Samudera Pasifik
Wirawai	Pegunungan Jayawijaya	Samudera Pasifik
Biri	Pegunungan Gatier Says	Samudera Pasifik
Tor	Pegunungan Gatier Says	Samudera Pasifik
Mamberamo	Pegunungan Jayawijaya	Samudera Pasifik
Wapoga	Pegunungan Jayawijaya	Samudera Pasifik
Warenai	Pegunungan Jayawijaya	Samudera Pasifik
Utua	Enarotali	Lautan Seram
U t a	Daratan Paniai	Laut Arafura
Setakwa	Pegunungan Hagga	Laut Arafura
Blumen	Pegunungan Hagga	Laut Arafura
Dumas	Wamena	Laut Arafura
Baliem	Pegunungan Jayawijaya	Laut Arafura
Kampung	Pegunungan Jayawijaya	Samudera Indonesia
Obais	Pegunungan Jayawijaya	Laut Arafura
Digul	Pegunungan Jayawijaya	Laut Arafura
Bian	Pegunungan Jayawijaya	Laut Arafura
Kumbe	Pegunungan Jayawijaya	Laut Arafura

Disamping sungai-sungai besar terdapat pula danau-danau besar dan kecil tersebar di daratan Papua dekat pantai maupun di pedalaman. Beberapa buah danau besar antara lain Danau Sentani di Kabupaten Jayapura dan Danau Paniai di Kabupaten Paniai. Danau-danau ini dapat dimanfaatkan sebagai daerah perikanan darat, perhubungan domestik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan, air minum, pariwisata maupun sebagai sumber tenaga listrik.

Oceanografi

Provinsi Papua memiliki garis pantai sepanjang 1.170 mil laut dengan luas perairan territorial mencapai 45.510 km² yang didalamnya mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting. Secara umum potensi lestari sumberdaya perikanan laut sebesar 1.524.800 ton/tahun dan perikanan darat sebesar 268.100 ton/tahun (belum termasuk potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut dan tambak diperkirakan sebesar 1.663.200 Ha).

LAPORAN AKHIR

Provinsi Papua memiliki ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi seperti Arowana (*Scleropages jardinii*) di Merauke dan udang Cherax di Jayawijaya. Jenis ikan hias lainnya seperti Ikan Rainbow Fish, Bambit, Iriatherina, Kaca, banyak terdapat di perairan umum yang ada di kabupaten / kota di wilayah Provinsi Papua.

Iklm

Provinsi Papua memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2011, hujan terjadi setiap bulan. Rata-rata curah hujan di Papua berkisar antara 2.166 mm³ (Merauke) sampai 3.859 mm³ (Nabire). Banyaknya hari hujan di Papua berkisar antara 196 hari (Merauke) – 247 (Biak).

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2011, suhu udara rata-rata Papua berkisar antara 22,1 °C – 28,7 °C. Suhu udara maksimum terjadi di stasiun Dok II Jayapura dan Nabire (31,9 °C), sedangkan suhu udara minimum terjadi di stasiun Wamena (24,0 °C).

Papua mempunyai kelembaban udara relatif tinggi. Dimana pada tahun 2011 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 76% (Kabupaten Jayawijaya – stasiun Wamena) sampai 85% (Nabire dan Biak) dan tekanan udara antara 834-1.030 mb. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari 47-66%. Jumlah gempa bumi yang dirasakan di Papua selama tahun 2011 sebanyak 36 kali, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya (82 kali).

Kependudukan

Jumlah penduduk Papua tahun 2011 adalah 2.928.750 jiwa. Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), jumlah penduduk Papua tahun 2011 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini terlihat dari angka *sex ratio* di atas 100 (111,62). Artinya setiap 100 perempuan terdapat 112 laki-laki. Kabupaten dengan *sex ratio* tertinggi adalah Kabupaten Mimika, yaitu 127,99. Sedangkan *sex ratio* terendah adalah Kabupaten Intan Jaya, yaitu 102,24.

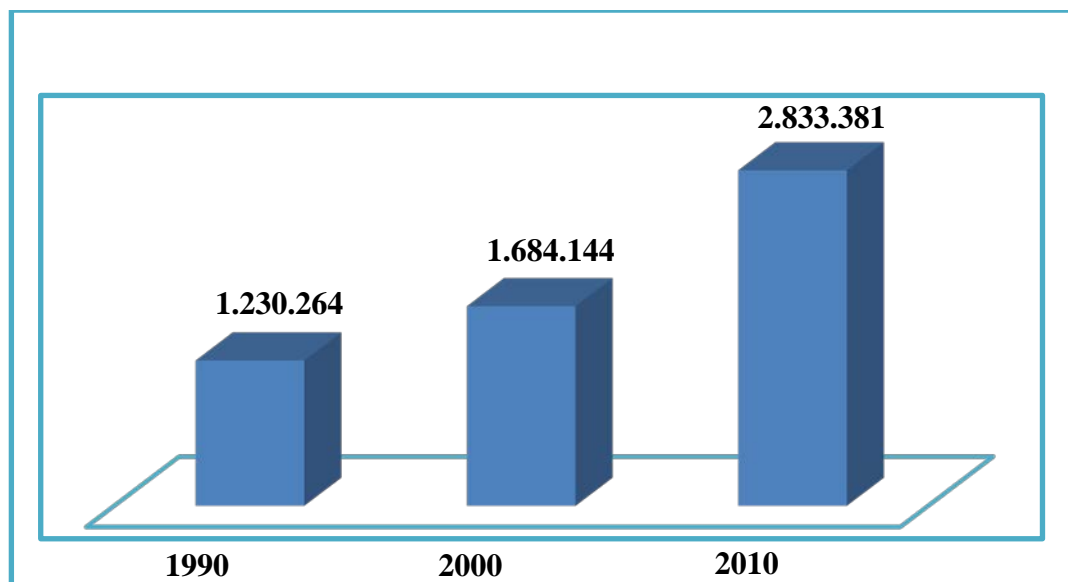
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 316.553,10 km² dengan kepadatan penduduk 9 jiwa/km². Dimana, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 278 jiwa/km², diikuti Kabupaten Jayawijaya sebanyak 85 jiwa/km² dan

LAPORAN AKHIR

Kabupaten Mimika sebanyak 82 jiwa/km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya, dimana kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua per tahun selama sepuluh tahun (antar Sensus Penduduk), yaitu sejak tahun 2000-2010 adalah 5,39%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Tolikara, yaitu mencapai 12,59%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan persentase mencapai 2,48%. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi tahun 2011 adalah 2,60.

Berdasarkan kelompok umur penduduk Papua didominasi oleh kelompok usia muda (0-14). Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 55 tahun ke atas) menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup Papua masih rendah (pada tahun 2010 angka harapan hidup di Papua sebesar 68,60%). Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Papua tahun 2011 cukup tinggi, yaitu sebesar 57,40%. Perubahan jumlah penduduk Papua sejak tahun 1990 hingga 2010 disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber : Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Papua Tahun 1990, 2000 dan 2010

LAPORAN AKHIR

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk Papua adalah 1.230.264 jiwa, sepuluh tahun kemudian atau pada tahun 2000 jumlah penduduk Papua telah mencapai 1.684.144 jiwa, selanjutnya pada tahun 2010 jumlah penduduk Papua bertambah menjadi 2.833.381 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti laju angka kelahiran dan imigrasi yang tinggi. Luas wilayah dan jumlah penduduk di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Papua menurut kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Luas/Total Area ^{*)}		Penduduk/Orang ^{**)}		Kepadatan Penduduk Orang/Km ²
	Km ²	%	Jiwa	%	
Merauke	47.406,90	14,98	201.137	6,87	4,24
Jayawijaya	2.331,19	0,74	199.258	6,80	85,47
Jayapura	14.390,16	4,55	114.824	3,92	7,98
Nabire	4.549,75	1,44	132.715	4,53	29,17
Kepulauan Yapen	4.936,37	1,56	85.315	2,91	17,28
Biak Numfor	13.017,45	4,11	130.593	4,46	10,03
Paniai	20.686,54	6,54	155.914	5,32	7,54
Puncak Jaya	2.446,50	0,77	105.332	3,60	43,05
Mimika	2.300,37	0,73	188.830	6,45	82,09
Boven Digoel	24.665,98	7,79	58.414	1,99	2,37
Mappi	23.178,45	7,32	85.129	2,91	3,67
Asmat	24.687,57	7,80	82.097	2,80	3,33
Yahukimo	15.057,90	4,76	169.167	5,78	11,23
Pegunungan Bintang	14.655,36	4,63	66.921	2,28	4,57
Tolikara	6.149,67	1,94	121.097	4,13	19,69
Sarmi	13.965,58	4,41	34.305	1,17	2,46
Keerom	9.015,03	2,85	50.043	1,71	5,55
Waropen	5.381,47	1,70	26.005	0,89	4,83
Supiori	634,24	0,20	16.441	0,56	25,92
Mamberamo Raya	28.034,86	8,86	19.165	0,65	0,68
Nduga	5.825,22	1,74	83.041	2,84	14,26
Lanny Jaya	3.439,79	1,09	155.668	5,32	45,26
Mamberamo Tengah	3.384,14	1,07	41.256	1,41	12,19
Yalimo	3.658,76	1,16	53.081	1,81	14,51
Puncak	5.618,84	1,78	96.555	3,30	17,18
Dogiyai	4.522,15	1,43	86.387	2,95	19,10
Intan Jaya	9.336,60	2,95	41.959	1,43	4,49
Deiyai	2.325,88	0,74	64.285	2,19	27,64
Kota Jayapura	950,38	0,30	263.816	9,01	277,59
Papua	316.553,10	100,00	2.928.750	100,00	9,25

Sumber : *) Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua

***) Badan Pusat Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat dilihat bahwa luas wilayah Provinsi Papua adalah 316.553,10 km² dengan jumlah penduduk 2.928.750 jiwa dan kepadatan

LAPORAN AKHIR

penduduk 9,25 orang/km². Luas daerah terluas adalah Kabupaten Merauke, yaitu 47.406,90 km² atau 14,98 dari luas wilayah Papua secara keseluruhan. Kemudian disusul oleh Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu seluas 28.034,86 km² atau 8,86% luas wilayah Papua secara keseluruhan. Sedangkan Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura merupakan daerah yang memiliki luasan wilayah terkecil, yaitu masing-masing 634,24 km² atau 0,20% dan 950,38 km² atau 0,30%. Berdasarkan Tabel 2.4 di atas juga, bila dilihat dari jumlah dan persentase penduduk, Kota Jayapura merupakan daerah yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Papua. Dimana, jumlah penduduk mencapai 263.816 jiwa atau 9,01% dari jumlah keseluruhan penduduk Papua dan kepadatan penduduk 277,59 orang/km². Hal ini disebabkan karena Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Supiori merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 16.441 jiwa atau 0,56% dengan kepadatan penduduk 25,92 orang/km². Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk 19.165 jiwa atau 0,65% dengan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,68 orang/km². Hal ini disebabkan karena kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten pemekaran baru. Jumlah penduduk di Provinsi Papua sejak tahun 1990 hingga tahun 2010 disajikan pada Tabel 2.5.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.5. Jumlah penduduk Papua tahun 1990 - 2010

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	1990	2000	2010
Merauke	243 722	135.192	195.716
Jayawijaya	355 562	83.671	196.085
Jayapura	246 467	86.036	111.943
Nabire		94.080	129.893
Kepulauan Yapen	70 333	58.879	82.951
Biak Numfor	90 843	97.564	126.798
Paniai	223 337	59.355	153.432
Puncak Jaya		51.705	101.148
Mimika		101.036	182.001
Boven Digoel		28.594	55.784
Mappi		58.969	81.658
Asmat		55.810	76.577
Yahukimo		117.297	164.512
Pegunungan Bintang		51.309	65.434
Tolikara		35.309	114.427
Sarmi		22.628	32.971
Keerom		34.856	48.536
Waropen		17.011	24.639
Supiori		12.164	15.874
Mamberamo Raya		12.545	18.365
Nduga		32.228	79.053
Lanny Jaya		63.008	148.522
Mamberamo Tengah		18.167	39.537
Yalimo		22.456	50.763
Puncak		47.406	93.218
Dogiyai		60.095	84.230
Intan Jaya		15.466	40.490
Deiyai		25.086	62.119
Kota Jayapura		186.222	256.705
Papua	1.230.264	1.684.144	2.833.381

Sumber : Sensus Penduduk 1990, 2000 dan 2010

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Papua setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana, pada tahun 1990 jumlah penduduk adalah 1.230.264, tahun 2000 adalah 1.684.144 dan tahun 2010 adalah 2.833.381. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi di Kota Jayapura. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 186.222 jiwa sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010 meningkat menjadi 256.705 jiwa atau sejak tahun 2000-2010 peningkatan penduduk di Kota Jayapura mencapai 2,49%. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi di Kota Jayapura didukung oleh statusnya sebagai ibu kota Provinsi Papua dan juga sebagai pusat studi pelajar di Papua. Sedangkan Kabupaten Supiori merupakan daerah yang memiliki peningkatan jumlah penduduk terendah. Dimana, jumlah penduduk pada

LAPORAN AKHIR

tahun 2000 adalah 12.164 jiwa dan pada tahun 2010 hanya meningkat 0,13%, yaitu sebanyak 15.874 jiwa. Banyaknya penduduk di Provinsi Papua menurut kabupaten dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Banyaknya penduduk di Provinsi Papua menurut kabupaten dan jenis kelamin

Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Merauke	105.394	95.743	201.137	110,08
Jayawijaya	102.237	97.021	199.258	105,38
Jayapura	60.670	54.154	114.824	112,03
Nabire	70.561	62.154	132.715	113,53
Yapen Waropen	43.921	41.394	85.315	106,10
Biak Numfor	67.194	63.399	130.593	105,99
Paniai	80.679	75.235	155.914	107,24
Puncak Jaya	56.114	49.218	105.332	114,01
Mimika	106.007	82.823	188.830	127,99
Boven Digoel	31.670	26.744	58.414	118,42
Mappi	44.261	40.868	85.129	108,30
Asmat	42.644	39.453	82.097	108,09
Yahukimo	88.666	80.501	169.167	110,14
Pegunungan Bintang	35.901	31.020	66.921	115,74
Tolikara	65.030	56.067	121.097	115,99
Sarmi	18.721	15.584	34.305	120,13
Keerom	27.137	22.906	50.043	118,47
Waropen	13.666	12.339	26.005	110,75
Supiori	8.578	7.863	16.441	109,09
Mamberamo Raya	10.039	9.126	19.165	110,00
Nduga	45.016	38.025	83.041	118,39
Lanny Jaya	83.045	72.623	155.668	114,35
Mamberamo Tengah	22.127	19.129	41.256	115,67
Yalimo	28.053	25.028	53.081	112,09
Puncak	50.168	46.387	96.555	108,15
Dogiyai	43.425	42.962	86.387	101,08
Intan Jaya	21.212	20.747	41.959	102,24
Deiyai	33.084	31.201	64.285	106,04
Kota Jayapura	139.565	124.251	263.816	112,33
Papua	1.544.785	1.383.965	2.928.750	111,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (Angka Sementara 2011)

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua adalah 2.928.750 jiwa. Dimana, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Provinsi Papua memiliki jumlah yang lebih banyak, yaitu 1.544.785 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu 1.383.965 jiwa dengan rasio jenis kelamin 111,62. Hal ini disebabkan karena laju kelahiran laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan yang lebih rendah. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua dan juga sebagai pusat atau kota pelajar memungkinkan jumlah penduduk yang lebih banyak dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki terbanyak, yaitu 139.565 jiwa dan perempuan 124.25 atau jumlah

LAPORAN AKHIR

penduduk di Kota Jayapura 94,2% didominasi oleh laki-laki dan 5,8% adalah perempuan. Sedangkan Kabupaten Supiori merupakan kabupaten pemekaran baru, sehingga memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Dimana, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu 8.579 jiwa sedangkan perempuan lebih sedikit, yaitu 7.863 jiwa atau jumlah penduduk di Kota Jayapura 95,7% didominasi oleh laki-laki dan 4,3% adalah perempuan. Banyaknya penduduk, rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Banyaknya penduduk, rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Provinsi Papua

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
1990	1.230.264	-	4,88
2000	1.684.144	-	4,10
2010	2.833.381	658.794	4,30

Sumber : Sensus Penduduk 1990, 2000 dan 2010

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 jumlah penduduk bertambah 453.880 jiwa dan sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 1.149.237 jiwa, sehingga jumlah penduduk pada tahun 2010 di Provinsi Papua secara keseluruhan menjadi 2.833.381 jiwa dengan jumlah rumah tangga mencapai 658.794 jiwa.

Rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 1990 adalah 4,88 namun, pada tahun 2000 jumlah anggota keluarga mengalami penurunan, yaitu 4,10. Kurangnya jumlah anggota keluarga ini dipengaruhi oleh program pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB). Namun, pada tahun 2010 jumlah anggota keluarga mengalami peningkatan menjadi 4,30. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya angka kelahiran. Banyaknya penduduk di Provinsi Papua menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.8.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.8. Banyaknya penduduk di Provinsi Papua menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0 – 4	168.021	158.475	326.496
5 – 9	162.641	155.878	318.519
10 – 14	178.082	152.686	330.768
15 – 19	160.163	134.223	294.386
20 – 24	133.396	128.415	261.811
25 – 29	134.611	143.674	278.285
30 – 34	136.382	141.132	277.514
35 – 39	135.088	127.847	262.935
40 – 44	120.544	95.357	215.901
45 – 49	92.900	63.856	156.756
50 – 54	56.154	37.640	93.794
55 – 59	31.610	20.355	51.965
60 – 64	18.399	12.243	30.642
65 – 69	8.915	6.242	15.157
70 – 74	4.353	3.118	7.471
75 +	3.526	2.824	6.350
Jumlah	1.544.785	1.383.965	2.928.750

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (Angka Sementara, 2011)

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk dengan kelompok umur 0-4 tahun memiliki jumlah paling banyak, yaitu 326.496 jiwa. Dimana, jumlah laki-laki adalah 168.021 jiwa dan jumlah perempuan 158.475 jiwa. Kemudian, diikuti oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 318.519 jiwa, dengan jumlah laki-laki 162.641 jiwa dan perempuan 155.878 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 330.768 jiwa, yang terdiri dari 178.082 jiwa laki-laki dan 152.686 jiwa perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh laju kelahiran yang tinggi dan tingkat perlindungan yang intensif oleh orang tua terhadap anak yang berada pada kelompok umur tersebut. Sedangkan sejak memasuki kelompok umur 15-75 tahun ke atas, jumlah jiwa semakin menurun. Adapun faktor-faktor penyebabnya, antara lain kematian dan juga adanya perpindahan ke luar Papua juga tuntutan pendidikan yang mengharuskan bersekolah di luar Papua. Dengan demikian, mengurangi jumlah penduduk pada usia tersebut.

LAPORAN AKHIR

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

Penyajian PDRB yang secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. Penyajian PDRB secara berkala ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, gambaran struktur perekonomian, perkembangan pendapatan per kapita, tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat inflasi atau deflasi.

Perkembangan PDRB 2007-2011

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku di Provinsi Papua terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Provinsi ini. Pada tahun 2011, nilai PDRB termasuk tambang yang merupakan akumulasi dari nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi atas dasar harga berlaku diestimasi telah Rp. 76,37 triliun turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku dan konstan dengan dan tanpa tambang pada tahun 2007-2011 disajikan pada Tabel 2.9.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.9. PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku dan konstan dengan dan tanpa tambang pada tahun 2007-2011

Tahun	Dengan Tambang (Rp)		Tanpa Tambang (Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2007	55.380.453,41	19.200.297,42	17.496.626,10	9.404.505,85
2008	61.516.238,47	18.931.841,59	21.928.604,97	10.489.193,54
2009	76.886.679,01	23.138.444,49	26.567.253,56	11.787.422,43
2010	87.776.576,67	22.407.284,20	31.617.674,48	13.097.168,91
2011	76.370.616,08	21.137.537,80	36.691.072,11	14.310.760,71

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 2011

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Provinsi Papua, pada tahun 2011 diperkirakan bernilai Rp. 21,13 triliun. Nilai ini lebih rendah 4,63% dibanding tahun sebelumnya yang telah mencapai Rp. 22,407 triliun. Dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, PDRB Papua atas dasar harga berlaku tahun 2011 telah mencapai Rp. 36,7 triliun atau meningkat 16,14% dari nilai tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Papua tahun 2011 bernilai Rp. 14,31 triliun. Nilai ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2010, yaitu sebesar 9,3%.

Pertumbuhan Ekonomi

Hingga tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Papua terlihat sangat berfluktuasi. Tahun 2011, Provinsi Papua mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,67% dimana setahun sebelumnya juga turun -3,16%. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada tahun 2008 (-1,40%). Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Papua lebih stabil. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 (12,38%) dan yang terendah pada tahun 2007 (8,77%). Sedangkan pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 9,27%.

LAPORAN AKHIR

Analisis *Share* Sektor-sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi makro Papua secara umum disebabkan oleh produksi sektor pertambangan dan penggalian yang juga berfluktuasi. Peranannya, di tahun 2011, yang sangat mendominasi pada PDRB Provinsi Papua disertai dengan pertumbuhan negatif yang cukup signifikan (-25,97%), menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua secara keseluruhan mengalami kontraksi hingga -5,67%. Sumbangan sektor pertambangan dan penggalian sendiri terhadap pertumbuhan -5,67% tersebut adalah sebesar -10,98%.

Delapan sektor lainnya memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Papua 2011. Sektor jasa-jasa yang pada PDRB Papua termasuk tambang merupakan kontributor tertinggi keempat, menyumbang sebesar 1,25% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumbangan yang cukup signifikan ini disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2011, yaitu 11,98%. Hampir sama dengan sektor jasa-jasa, sektor bangunan yang merupakan kontributor tertinggi ketiga pada PDRB termasuk tambang, juga memberi sumbangan yang masih cukup nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu 1,50%. Hal ini juga disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2011 (16,52%).

Sektor pertanian (kontributor tertinggi kedua pada PDRB Papua termasuk tambang) menyumbang 0,60% pada pertumbuhan ekonomi 2011 atau lebih rendah dari sumbangan sektor jasa-jasa dan sektor bangunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhannya yang jauh lebih lambat dibanding kedua sektor tersebut, yaitu 3,64%. Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan 0,73% terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Sedangkan, tiga sektor lainnya menyumbang di bawah 0,3%. Peranan sektor-sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua termasuk tambang tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.10.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.10. Peranan sektor-sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua termasuk tambang tahun 2011

No	Sektor Ekonomi	Peranan terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2011(%)
1	Pertanian	11,71	4,04	0,60
2	Pertambangan & Penggalian	52,46	-25,97	-10,98
3	Industri Pengolahan	1,86	7,64	0,19
4	Listrik & Air Bersih	0,17	5,02	0,01
5	Bangunan	10,66	16,52	1,50
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,94	9,74	0,73
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,76	9,31	0,73
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,74	8,27	0,29
9	Jasa-jasa	8,69	11,98	1,26
	PDRB	100,00	-5,67	-5,67

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Rp. Milyar)

No	Lapangan Usaha	2009(Rp)	2010(Rp)	2011(Rp)
1	Pertanian	7.324,83	8.177,70	8.946,43
	1. Tanaman Bahan Makanan	3.315,10	3.639,19	4.002,84
	2. Tanaman Perkebunan	375,70	421,14	497,77
	3. Peternakan	447,52	514,93	559,58
	4. Kehutanan	1.008,28	1.104,36	1.162,01
	5. Perikanan	2.178,23	2.498,08	2.724,23
2	Pertambangan dan Penggalian	50.587,07	56.484,33	40.271,22
3	Industri Pengolahan	1.091,23	1.239,18	1.421,57
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	109,23	119,92	129,43
5	Bangunan	4.706,28	6.359,20	8.139,83
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.447,70	3.943,34	4.538,79
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	3.348,77	3.890,63	4.397,80
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.670,98	1.858,56	2.092,98
9	Jasa-jasa	4.600,59	5.703,72	6.432,55
	Jumlah	76.886,68	87.776,58	76.370,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.11 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2009 adalah Rp. 76.886,68,- milyar dan pada tahun 2010, PDRB meningkat Rp. 10.889,90 milyar menjadi Rp. 87.776,58,- milyar

LAPORAN AKHIR

pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 PDRB menurun Rp. 11.405,96,-milyar, sehingga PDRB pada di tahun 2011 menjadi Rp. 76.370,62,- milyar. Berdasarkan Tabel 2.11 juga dapat dilihat bahwa PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian. Dimana, pada tahun 2007 PDRB yang dihasilkan adalah Rp. 50.587,07,- milyar dan terjadi peningkatan Rp. 5.897,26,- milyar sehingga PDRB di tahun 2010 menjadi Rp. 56.484,33,- milyar. Namun, pada tahun 2011 PDRB pada sektor tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 16.213,11,- milyar. Sehingga PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi Rp. 40.271,22,- milyar di tahun 2011. Sedangkan dari lapangan usaha listrik, gas dan air bersih merupakan penyumbang PDRB atas dasar harga berlaku yang terendah. Dimana, PDRB yang disumbang oleh lapangan usaha/sektor tersebut adalah Rp. 109,23,- milyar tahun 2009. Pada tahun 2010, terjadi peningkatan Rp. 10,69,- milyar, sehingga PDRB di tahun 2010 adalah Rp. 119,92,- milyar dan terus meningkat hingga tahun 2011. PDRB di tahun 2011 mengalami peningkatan Rp. 9,51,- milyar. Sehingga PDRB pada tahun 2011 adalah Rp. 129,43,- milyar.

Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (Rp. Milyar)

No	Lapangan Usaha	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Pertanian	3.563,40	3.707,52	3.842,41
1.	Tanaman Bahan Makanan	1.769,77	1.805,34	1.864,91
2.	Tanaman Perkebunan	171,87	184,20	199,07
3.	Peternakan	244,68	266,09	287,42
4.	Kehutanan	481,35	510,16	510,89
5.	Perikanan	895,73	941,73	980,13
2	Pertambangan dan Penggalian	11.495,77	9.475,04	7.089,38
3	Industri Pengolahan	515,78	558,80	601,47
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	48,65	51,57	54,16
5	Bangunan	1.668,19	2.041,29	2.378,49
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.518,25	1.677,49	1.840,84
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	1.536,71	1.747,42	1.910,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	745,12	792,78	858,34
9	Jasa-jasa	2.046,58	2.355,39	2.562,33
	Jumlah	23.138,44	22.407,28	21.137,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.12 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2009 adalah Rp. 23.138,44,- milyar dan pada tahun 2010, PDRB menurun Rp. 731,16,- milyar menjadi Rp. 22.407,28,- milyar pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 PDRB menurun Rp. 1.269,74,-milyar, sehingga PDRB pada di tahun 2011 menjadi Rp. 21.137,54,- milyar.

LAPORAN AKHIR

Berdasarkan Tabel 2.12 juga dapat dilihat bahwa PDRB tertinggi atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian. Berbeda dengan PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku, dimana PDRB yang disumbangkan lebih rendah. Pada tahun 2007 PDRB yang dihasilkan adalah Rp. 11.495,77,- milyar dan terjadi penurunan Rp. 2.020,73,- milyar sehingga PDRB di tahun 2010 menjadi Rp. 9.475,04,- milyar. PDRB pada sektor tersebut terus mengalami penurunan sebesar Rp. 2.385,66,- milyar. Sehingga PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi Rp. 7.089,38,- milyar di tahun 2011. Sedangkan dari lapangan usaha listrik, gas dan air bersih merupakan penyumbang PDRB atas dasar harga konstan yang terendah. Walaupun dekina, PDRB dari lapangan usaha/sektor ini terus mengalami peningkatan. Dimana, PDRB yang disumbang oleh lapangan usaha/sektor tersebut adalah Rp. 48,65,- milyar pada tahun 2009. Pada tahun 2010, terjadi peningkatan Rp. 2,92,- milyar, sehingga PDRB di tahun 2010 adalah Rp. 51,57,- milyar dan terus meningkat hingga tahun 2011. PDRB di tahun 2011 mengalami peningkatan Rp2,59,- milyar. Sehingga PDRB pada tahun 2011 adalah Rp. 54,16,- milyar.

PDRB Perkapita

Hingga tahun 2011, nilai PDRB perkapita termasuk tambang di Provinsi Papua mencapai Rp. 24,54 juta atau turun 20,78% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan satu-satunya pertumbuhan negatif selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2007 pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 18,65%. Sementara pertumbuhan positif terkecil terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 5,4%. Sedangkan PDRB tanpa tambang perkapita tahun 2011 bernilai Rp. 11,79 juta atau tumbuh 5,66% dari tahun sebelumnya. Dibanding tahun 2006, nilai ini telah berkembang hampir dua kali lipat, dimana saat itu PDRB perkapita bernilai Rp. 6,40 juta. Selama periode 2007-2011, pertumbuhan PDRB perkapita tanpa tambang tahun 2011 merupakan yang paling kecil.

PDRB Menurut Penggunaan

Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Papua sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga (54,86% pada tahun 2011). Disusul untuk

LAPORAN AKHIR

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik 36,38%, konsumsi pemerintah 27,03% dan net ekspor 26%.

Pada tahun 2011, konsumsi rumah tangga tumbuh 6,55% dari tahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda, komponen konsumsi pemerintah dan PTMB tumbuh 9,21% dan 7,92%. Sementara itu, di tahun yang sama nilai ekspor mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar -30,11%. PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut penggunaan sejak tahun 2009-2011 (Rp. Milyar) disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku menurut penggunaan sejak tahun 2009-2011 (Rp. Milyar)

Penggunaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011(Rp)
Konsumsi Rumah Tangga	31.609,31	36.412,74	41.897,88
Konsumsi Lembaga Swasta Non-Profit	838,93	987,95	1.195,19
Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	13.993,68	17.594,62	20.639,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.809,02	24.592,56	27.783,95
Perubahan Stok	-5.299,67	635,82	-9.496,39
Ekspor Luar Negeri dan Antar Pulau	54.357,58	61.351,51	47.091,43
Impor dari Luar Negeri dan Antar Pulau	39.422,17	53.798,63	52.740,62
Jumlah	76.886,68	87.776,58	76.370,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku meningkat pada tahun 2010, yaitu Rp. 87.776,58,- milyar dibanding penggunaan PDRB tahun sebelumnya (2009) yang lebih rendah, yaitu Rp. 76.886,68,- milyar. Namun, pada tahun 2011 penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan, yaitu Rp. 76.370,62,- milyar. Tingginya nilai PDRB pada tahun 2010 ini disebabkan karena tingginya penggunaan untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan dari setiap aspek yang ada. Sedangkan pada tahun 2011, nilai PDRB menurun, karena penggunaan uang ditekan lebih rendah, terutama pada aspek stok perubahan, impor dan ekspor dari luar negeri maupun antar pulau, walaupun beberapa aspek lainnya penggunaan PDRB masih tinggi.

Berdasarkan Tabel 2.13 juga, dapat dilihat bahwa penggunaan PDRB oleh aspek ekspor luar negeri dan antar pulau sejak tahun 2009-2011 lebih banyak penggunaannya dibanding penggunaan oleh aspek lain, dengan nilai masing-masing PDRB sejak tahun 2009-2011 adalah Rp. 54.357,58 milyar, Rp. 61.351,51 milyar dan Rp. 47.091,43 milyar. Tingginya penggunaan PDRB oleh aspek ini biaya ekspor yang lebih mahal. Sedangkan

LAPORAN AKHIR

penggunaan PDRB terendah adalah aspek perubahan stok dengan jumlah masing-masing PDRB sejak tahun 2009-2011 adalah Rp. -5.299,67 milyar, Rp. 635,82 milyar dan Rp. -9.496,39 milyar.

Tabel 2.14. PDRB Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut penggunaan sejak tahun 2009-2011 (Rp. Milyar)

Penggunaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Konsumsi Rumah Tangga	14.919,17	16.176,95	17.236,65
Konsumsi Lembaga Swasta Non-Profit	448,10	510,46	581,68
Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	4.233,82	4.902,48	5.353,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.428,34	9.252,15	9.984,81
Perubahan Stok	-4.746,37	-4.707,44	-4.397,48
Ekspor Luar Negeri dan Antar Pulau	15.429,01	13.722,28	9.590,23
Impor dari Luar Negeri dan Antar Pulau	15.573,63	17.449,59	17.212,22
Jumlah	23.138,44	22.407,28	21.137,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.14, PDRB Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut penggunaan sejak tahun 2009-2011 mengalami penurunan. PDRB pada tahun 2009 adalah Rp. 23.138,44,- milyar. Selanjutnya terjadi penurunan Rp. 731,16,- milyar menjadi Rp. 22.407,28, milyar pada tahun 2010. Kembali terjadi penurunan Rp. 1.269,74,- milyar, sehingga PDRB pada tahun 2011 menjadi Rp. 21.137,54,- milyar. Berdasarkan Tabel 2.14 di atas, PDRB tertinggi berasal dari impor dari luar negeri dan antar pulau yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 PDRB yang berasal dari impor luar negeri dan antar pulau adalah Rp. 15.573,63,- milyar. Kemudian mengalami kenaikan Rp. 1.875,96,- milyar menjadi Rp. 17.449,59,- milyar pada tahun 2010. Namun, mengalami penurunan Rp. 237,37,- milyar menjadi Rp. 17.212,22,- milyar. Sedangkan PDRB terendah adalah perubahan stok. Pada tahun 2009 PDRB mencapai Rp. -4.746,37,- milyar kemudian meningkat menjadi Rp. -4.707,44,- milyar pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga Rp. -4.397,48,- milyar.

Secara lebih jelas penggunaan PDRB dari setiap aspek penggunaan dijelaskan sebagai berikut.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Penggunaan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, khususnya lima tahun terakhir. Tahun 2011, nilai konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua yang mencapai Rp. 41,9 milyar menyerap 54,86% PDRB Provinsi Papua. Persentase ini meningkat signifikan

LAPORAN AKHIR

dibanding tahun 2007 yang saat itu bernilai 38,09%. Namun, khususnya pada tahun 2007 pertumbuhan komponen ini menurun mencapai 13,93%. Pertumbuhan ini terus melambat hingga 6,55% di tahun 2011.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Non-Profit

Persentase penggunaan PDRB Papua dalam lima tahun terakhir untuk konsumsi swasta non-profit perlahan-lahan mengalami peningkatan, yaitu 0,94% di tahun 2007 menjadi 1,56% di tahun 2011. Walaupun demikian, pertumbuhan komponen ini cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan terendah selama periode 2007-2011 adalah 12,46% di tahun 2008 dan yang tertinggi 26,30% di tahun 2009. Tingginya pertumbuhan di tahun 2009 tersebut sangat dipengaruhi oleh aktifitas Pemilu Presiden yang meningkatkan konsumsi lembaga swasta non-profit khususnya partai-partai politik. Sedangkan tahun 2011, pertumbuhannya mengalami perlambatan dibanding 2009 yang signifikan, yaitu menjadi 13,92% atau hampir sama dengan pertumbuhan di tahun 2010.

c. Konsumsi Pemerintah

Secara umum, konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dalam persentase penggunaan PDRB Papua. Tahun 2007, komponen konsumsi pemerintah hanya menyerap 16,77%, terus meningkat hingga 19,46% di tahun 2008. Tahun 2009, mengalami sedikit penurunan menjadi 18,20%, namun kemudian meningkat menjadi 27,03% di tahun 2011.

Peningkatan persentase penggunaan PDRB untuk konsumsi pemerintah tidak dibarengi dengan pertumbuhannya yang cenderung mengalami *trend* yang melambat, khususnya dalam lima tahun terakhir. Tahun 2007, komponen ini telah tumbuh 35,17%, namun setelah beberapa kali berfluktuasi, tahun 2011 konsumsi pemerintah hanya tumbuh 9,21%.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Persentase penyerapan PMTB terhadap PDRB hampir sama dengan komponen konsumsi pemerintah yang mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari 24,92% di tahun 2007 menjadi 36,38% di tahun 2011. Demikian juga pertumbuhannya, komponen PMTB juga mengalami perlambatan pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Setelah cukup tinggi di tahun 2007, yaitu 20,13%, pertumbuhan

LAPORAN AKHIR

komponen pengeluaran dalam bentuk investasi fisik terus melambat hingga 7,92% di tahun 2011.

e. Perubahan Stok

Komponen perubahan stok memberi peranan negatif terhadap keseluruhan penggunaan PDRB Papua dalam lima tahun terakhir. Tahun 2011, peranannya adalah -12,43% dan terendah selama lima tahun.

Berubahnya stok atau persediaan barang setengah jadi maupun jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi sangat fluktuatif. Pada tahun 2007, pertumbuhan perubahan stok sangat tinggi hingga 101,36%, namun tahun 2008 tumbuh negative, yaitu -6,80%. Setelah itu tiga tahun berikutnya komponen perubahan stok juga masih berfluktuasi dari 27,12% di tahun 2009, dan turun kembali ke angka 6,58% pada tahun 2011.

f. Ekspor dan Impor

Total nilai ekspor Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan ekspor luar negeri memberi peranan penting dalam peningkatan tersebut. Tahun 2011, total nilai ekspor Papua mencapai Rp. 47,09 miliar sedangkan ekspor ke luar negeri sendiri bernilai Rp 33,48 miliar. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya nilai komponen penggunaan lainnya, peranan ekspor terhadap pembentukan nilai PDRB Papua mengalami penurunan. Tahun 2007, ekspor Papua berperan sebesar 73,83% namun perlahan-lahan menurun hingga 61,66% di tahun 2011. Sementara itu, kontribusi komponen impor sebagai komponen pengurangan pada keseluruhan nilai PDRB, selama periode 2007-2011 cukup stabil, yaitu pada kisaran 45-70%.

Pertumbuhan komponen ekspor maupun impor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Namun demikian, fluktuasi yang dialami komponen impor lebih signifikan. Selama periode 2007-2011, komponen ini mengalami pertumbuhan positif sebanyak tiga kali, yaitu di tahun 2008 (16,99%), 2009 (2,07%) dan 2010 (12,05%). Sedangkan dua tahun lainnya tumbuh negatif, yaitu -6,87% di tahun 2007 dan -1,36% di tahun 2011.

Sementara itu, komponen ekspor secara umum mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibanding komponen impor. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi komponen ini 18,35%, yaitu di tahun 2009, sedangkan terendah adalah -30,11% di tahun 2011. Terus bertambahnya nilai ekspor, khusus ekspor luar

LAPORAN AKHIR

negeri yang tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhannya disebabkan oleh peningkatan nilai produk dan barang yang diekspor, sementara jumlah produksinya sendiri tidak stabil dari tahun ke tahun.

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten/Kota 2007-2010 (Rp. Milyar)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
Merauke	2.289,15	2.630,43	3.071,74	3.621,01
Jayawijaya	646,73	787,67	938,95	1.105,04
Jayapura	1.145,15	1.336,57	1.624,76	1.967,10
Nabire	1.154,32	1.370,29	1.583,26	1.924,08
Kepulauan Yapen	512,33	599,53	660,06	770,43
Biak Numfor	1.073,96	1.210,07	1.359,48	1.545,52
Paniai	322,83	379,71	423,61	467,65
Puncak Jaya	334,66	457,91	538,15	641,30
Mimika	39.290,61	41.356,06	52.515,73	59.098,61
Boven Digoel	863,75	1.102,03	1.336,86	1.622,71
Mappi	394,74	516,21	657,91	755,64
Asmat	356,53	464,15	521,39	620,34
Yahukimo	168,77	240,30	314,32	412,94
Pegunungan Bintang	245,34	403,04	513,66	646,88
Tolikara	239,24	302,82	386,33	505,03
Sarmi	404,95	502,67	599,85	721,38
Keerom	497,53	581,50	705,31	858,26
Waropen	164,89	194,13	237,08	295,68
Supiori	261,36	303,67	334,74	377,00
Mamberamo Raya	112,43	141,38	188,65	267,83
Nduga	62,95	76,06	105,45	159,39
Lanny Jaya	157,63	173,48	226,25	335,65
Mamberamo Tengah	64,37	76,14	102,91	166,44
Yalimo	67,43	78,76	102,82	152,73
Puncak	220,69	297,19	369,02	462,17
Dogiyai	315,96	373,91	455,55	567,92
Intan Jaya	107,27	123,88	146,25	187,95
Deiyai	150,87	170,88	196,34	227,15
Kota Jayapura	4.015,70	5.125,42	6.816,48	8.010,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.15 di atas, dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2007-2010 mengalami peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berasal dari Kabupaten Mimika, yaitu Rp. 39.290,61 milyar pada tahun 2007, dan meningkat Rp. 206.545 milyar menjadi Rp. 41.356,06 milyar pada tahun 2008. Selanjutnya mengalami kenaikan Rp. 11.159,67 milyar sehingga PDRB pada tahun 2009 adalah Rp. 52.515,73

LAPORAN AKHIR

milyar dan mengalami kenaikan lagi, yaitu Rp. 6.582,88 milyar sehingga PDRB di tahun 2010 menjadi Rp. 59.098,61 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku terendah berasal dari Kabupaten Nduga. Walaupun demikian, PDRB di Kabupaten Nduga terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2007 PDRB Kabupaten Nduga adalah Rp. 62,95 milyar kemudian mengalami kenaikan Rp. 13,11 milyar sehingga PDRB di tahun 2008 menjadi Rp. 5.125,42. Tahun 2009 PDRB menjadi Rp. 6.816,48 milyar karena terjadi kenaikan Rp. 29,39 milyar. PDRB di Kabupaten Nduga terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2010 PDRB menjadi Rp. 8.010,38 milyar karena terjadi kenaikan Rp. 53,94 milyar dari tahun 2009.

Tabel 2.16. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut Kabupaten/Kota 2007-2010 (Rp. Milyar)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
Merauke	1.229,81	1.295,31	1.391,05	1.526,93
Jayawijaya	392,77	430,08	472,91	518,57
Jayapura	639,88	698,04	798,05	912,84
Nabire	686,63	743,69	801,68	901,29
Kepulauan Yapen	312,89	332,14	349,13	376,67
Biak Numfor	733,73	775,80	824,41	892,38
Paniai	156,69	169,97	178,26	186,29
Puncak Jaya	156,34	193,97	210,51	230,66
Mimika	10.626,65	9.380,57	12.439,15	10.637,10
Boven Digoel	390,84	422,66	458,42	503,36
Mappi	208,11	241,94	271,32	297,85
Asmat	180,60	210,55	218,94	241,71
Yahukimo	110,80	134,51	153,42	176,23
Pegunungan Bintang	153,69	198,24	225,02	250,52
Tolikara	148,33	168,17	187,22	208,55
Sarmi	184,49	202,72	220,98	245,51
Keerom	257,78	287,11	320,36	362,52
Waropen	96,64	104,79	117,56	134,72
Supiori	102,09	110,85	119,28	126,34
Mamberamo Raya	56,22	66,31	80,71	105,25
Nduga	39,87	44,44	54,94	73,58
Lanny Jaya	106,34	113,22	133,25	168,59
Mamberamo Tengah	41,59	45,77	54,18	74,08
Yalimo	42,79	46,00	53,48	68,75
Puncak	110,10	130,75	148,24	171,31
Dogiyai	187,32	204,17	226,37	256,78
Intan Jaya	59,12	63,28	72,11	87,95
Deiyai	91,83	95,39	103,59	114,78
Kota Jayapura	2.187,36	2.548,99	3.122,23	3.369,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.16 di atas, dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2007-2010 berbeda dengan PDRB menurut harga berlaku karena terdapat kabupaten

LAPORAN AKHIR

mengalami peningkatan namun ada kabupaten yang mengalami penurunan. PDRB atas dasar harga konstan tertinggi berasal dari Kabupaten Mimika, yaitu Rp. 10.626,65 milyar pada tahun 2007, dan terjadi penurunan Rp. 1.246,08 milyar sehingga PDRB menjadi Rp. 9.380,57 milyar pada tahun 2008. Selanjutnya mengalami kenaikan Rp. 3.058,58 milyar sehingga PDRB pada tahun 2009 adalah Rp. 12.439,15 milyar namun mengalami penurunan, yaitu Rp. 1.802,05 milyar sehingga PDRB di tahun 2010 menjadi Rp. 10.637,10 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan terendah berasal dari Kabupaten Nduga. Walaupun demikian, PDRB di Kabupaten Nduga terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2007 PDRB Kabupaten Nduga adalah Rp. 39,87 milyar kemudian mengalami kenaikan Rp. 4,57 milyar sehingga PDRB di tahun 2008 menjadi Rp. 44,44. Tahun 2009 PDRB menjadi Rp. 54,94 milyar karena terjadi kenaikan Rp. 10,5 milyar. PDRB di Kabupaten Nduga terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2010 PDRB menjadi Rp. 73,58 milyar karena terjadi kenaikan Rp. 18,64 milyar dari tahun 2009.

Laju Pertumbuhan PDRB

Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
Merauke	5,33	7,39	9,77
Jayawijaya	9,50	9,96	9,66
Jayapura	9,09	14,33	14,38
Nabire	8,31	7,80	12,43
Kepulauan Yapen	6,15	5,12	7,89
Biak Numfor	5,73	6,26	8,25
Paniai	8,48	4,88	4,50
Puncak Jaya	24,07	8,53	9,57
Mimika	-11,73	32,61	-14,49
Boven Digoel	8,14	8,46	9,80
Mappi	16,26	12,14	9,78
Asmat	16,58	3,99	10,40
Yahukimo	21,40	14,06	14,87
Pegunungan Bintang	28,99	13,51	11,33
Tolikara	13,38	11,33	11,39
Sarmi	9,88	9,01	11,10
Keerom	11,38	11,58	13,16
Waropen	8,43	12,19	14,60
Supiori	8,58	7,61	5,92
Mamberamo Raya	17,96	21,71	30,40

LAPORAN AKHIR

Nduga	11,46	23,64	33,92
Lanny Jaya	6,47	17,70	26,52
Mamberamo Tengah	10,04	18,39	36,73
Yalimo	7,51	16,26	28,56
Puncak	18,75	13,38	15,56
Dogiyai	9,00	10,87	13,44
Intan Jaya	7,05	13,94	21,98
Deiyai	3,88	8,60	10,80
Kota Jayapura	16,53	22,49	7,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.17 di atas, Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2008-2010 di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB terendah adalah Kabupaten Mimika dengan persentase laju pertumbuhan, yaitu -11,73%. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan persentase laju pertumbuhan, 28,99%. Selanjutnya pada tahun 2009 laju pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Mimika dengan persentase laju pertumbuhan, yaitu 32,61%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Asmat dengan persentase laju pertumbuhan, yaitu 3,99%. Pada tahun 2010, Kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB terendah adalah Kabupaten Mimika dengan persentase laju pertumbuhan, yaitu -14,49%. Sedangkan kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Tengah dengan persentase laju pertumbuhan, yaitu 36,73%.

PDRB Menurut Kelompok Sektor

Nilai tambah kelompok sektor primer atas dasar harga berlaku hingga tahun 2011 diestimasi telah mencapai 49,01% triliun rupiah atau turun 24,20% dari nilai tambah tahun 2010. Pertumbuhan ini melambat signifikan dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 11,66%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir kelompok sektor primer mengalami pertumbuhan positif namun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terlambat terjadi pada tahun 200 (5,89%), sedangkan yang tertinggi pada tahun 2009, yaitu 25,43%. PDRB Provinsi Papua harga berlaku atas dasar dan harga konstan tahun 2000 menurut kelompok sektor termasuk tambang 2007-2011 disajikan pada Tabel 2.18.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.18. PDRB Provinsi Papua harga berlaku atas dasar dan harga konstan tahun 2000 menurut kelompok sektor termasuk tambang 2007-2011

Kelompok Sektor	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Primer					
Harga Berlaku	43.600.973,51	46.169.998,58	57.911.899,38	64.662.033,12	49.014.235,93
Harga Konstan	13.168.928,29	11.993.174,61	15.059.171,85	13.182.554,88	10.856.484,64
Sekunder					
Harga Berlaku	3.565.481,59	4.790.247,58	5.906.731,26	7.718.292,13	9.690.840,18
Harga Konstan	1.738.057,35	1.983.841,25	2.232.622,78	2.651.659,27	3.034.119,74
Tersier					
Harga Berlaku	8.213.998,31	10.555.992,31	13.068.048,37	15.396.251,43	16.168.937,04
Harga Konstan	4.293.311,78	4.954.825,74	5.846.649,85	6.573.070,05	7.246.933,42
PDRB					
Harga Berlaku	46.895.228,88	55.380.453,41	76.886.679,01	87.776.576,67	89.451.248,76
Harga Konstan	18.402.197,42	19.200.297,42	23.138.444,49	22.407.284,20	21.137.537,80

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua 2011

Nilai tambah kelompok sektor primer tahun 2011 atas dasar harga konstan yang telah mencapai Rp. 10,86 triliun mengalami penurunan -17,65% dibanding tahun 2010 yang telah mencapai Rp. 13,18 triliun. Namun demikian, hampir sama dengan atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi kelompok sektor primer atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2009 (25,56%) dan juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, berbeda dengan atas dasar harga berlaku yang secara konsisten tumbuh positif, di beberapa tahun nilai tambah kelompok sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif.

Kelompok sektor sekunder secara konsisten mengalami peningkatan nilai tambah khususnya dalam lima tahun terakhir. Tahun 2012 atas dasar harga berlaku, aktifitas kelompok sektor ini bernilai Rp. 9,69 triliun atau tumbuh 25,56%. Demikian juga dengan harga konstan, nilai tambah kelompok sektor sekunder terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai Rp. 3,03 triliun pada tahun 2011 atau tumbuh 14,42% dari tahun 2010. Hampir sama dengan kelompok sektor sekunder, nilai tambah kelompok sektor tersier baik atas dasar harga berlaku maupun konstan juga meningkat dari tahun ke

LAPORAN AKHIR

tahun. Atas dasar harga berlaku, nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 17,66 triliun dan atas harga konstan Rp. 7,23 triliun atau masing-masing tumbuh 14,74% dan 10,25%.

Pada tahun 2011, kelompok sektor primer yang terdiri atas sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi sekitar 64% total nilai tambah ekonomi Provinsi Papua. Namun demikian dominasi tersebut semakin menurun khususnya dalam lima tahun terakhir. Tahun 2007, kontribusi kelompok sektor unggulan ini 78,73%, namun terus menurun menjadi 64,18% di tahun 2011. Sebaliknya, kelompok sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan kontribusi khususnya selama periode 2007-2011. Kelompok sektor sekunder yang merupakan contributor terendah di antara ketiga kelompok sektor, pada tahun 2007 berperan sebesar 6,44% dan terus meningkat hingga 12,69% di tahun 2011. Sementara, kelompok sektor sekunder yang merupakan contributor terendah di antara ketiga kelompok sektor, pada tahun 2007 berperan sebesar 6,44% dan terus hingga 12,69% di tahun 2011. Sementara, kelompok sektor tersier pada tahun 2011 berperan sebesar 23,13%. Tinggi rendahnya peranan serta laju pertumbuhan masing-masing kelompok sektor menyebabkan perubahan pada sumbangan ketiga kelompok sektor terhadap total laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Papua. Sebagai contributor tertinggi, kelompok sektor primer merupakan kelompok sektor yang paling mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Tahun 2011, pertumbuhan negatifnya (-17,65%) menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menjadi -5,67% dimana andil yang diberikan adalah sebesar -10,38%. Sementara, sebesar 1,71% dan 3,01% masing-masing merupakan sumbangan dari kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi ini pada tahun 2011. Kontribusi kelompok sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2006-2010 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Kontribusi kelompok sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2006-2010

Kelompok Sektor	Tahun				
	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
Primer	0,55	-6,12	16,19	-8,11	-10,38
Sekunder	0,90	1,28	1,31	1,81	1,71
Tersier	2,89	3,45	4,71	3,14	3,01
PDRB	4,34	-1,40	22,22	-3,16	-5,67

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua 2011

LAPORAN AKHIR

2.3. Permasalahan Emisi GRK

1. Pertanian

Luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi sawah dan padi ladang sejak tahun 1997 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan, baik luas maupun produksi. Kabupaten/kota dengan sawah terluas di Provinsi Papua adalah Kabupaten Nabire dengan luasan 196.666,83 Ha, sedangkan Kabupaten/kota dengan luas sawah terkecil adalah Kabupaten Mimika dengan luas 1.006 ha.

Luas panen padi sawah dan padi ladang menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Luas panen padi sawah dan padi ladang menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produksi Rata-Rata (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produksi Rata-Rata (ton/ha)
1	Merauke	22.576,00	90.654	40,16			
2	Jayawijaya	109,00	415	38,10			
3	Jayapura	839,00	3.190	38,02	64	212	33,12
4	Paniai						
5	Puncak Jaya						
6	Nabire	1.067,00	4.453	41,74	152	499	32,82
7	Mimika	177,00	459	39,20			
8	Kepulauan Yapen				79	216	33,07
9	Biak Numfor						
10	Boven Digoel						
11	Mappi						
12	Asmat						
13	Yahukimo						
14	Pegunungan Bintang				158	522	33,02
15	Tolikara						
16	Sarmi	46	173	37,56	165	542	32,84
17	Keerom				228	748	32,79
18	Waropen				1.048	3.452	32,94
19	Supiori						
20	Mamberamo Raya						
21	Nduga						
22	Lanny Jaya						

LAPORAN AKHIR

23	Mamberamo Tengah						
24	Yalimo						
25	Puncak						
26	Dogiyai						
27	Deiyai						
28	Intan Jaya						
29	Kota Jayapura	2.614,00	9.857	37,71	9.857		
Jumlah 2011		27.368	109.202	39,90	1.894	6.236	32,92
2010		24.661	95.965	38,91	2.025	6.645	32,81

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, 2012.

Produksi palawija menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Jagung

Luas panen jagung menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 3.825 ha dengan jumlah produksi 6.885 ton dan produksi rata-rata 18,00 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kota Jayapura seluas 629 ha dengan jumlah produksi 1.140 ton dan produksi rata-rata 18,13 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Asmat seluas 3 ha dengan jumlah produksi 5 ton dan produksi rata-rata 16,17 ton/ha.

- Ubi Kayu

Luas panen ubi kayu menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 2.867 ha dengan jumlah produksi 34.899 ton dan produksi rata-rata 121,73 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kabupaten Waropen, yaitu seluas 438 ha dengan jumlah produksi 5.351 ton dan produksi rata-rata 122,16 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Asmat, yaitu seluas 30 ha dengan jumlah produksi 357 ton dan produksi rata-rata 118,99 ton/ha.

- Kacang Tanah

Luas panen kacang tanah menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 1.979 ha dengan jumlah produksi 2.105 ton dan produksi rata-rata 10,64 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kabupaten Nabire, yaitu seluas 260 ha dengan jumlah produksi 268 ton dan produksi rata-rata 10,31 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Asmat, yaitu seluas 5 ha dengan jumlah produksi 6 ton dan produksi rata-rata 11,41 ton/ha.

LAPORAN AKHIR

- **Kacang Kedelai**

Luas panen kacang kedelai menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 3.549 ha dengan jumlah produksi 3.958 ton dan produksi rata-rata 11,59 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kabupaten Keerom, yaitu seluas 995 ha dengan jumlah produksi 1.108 ton dan produksi rata-rata 11,14 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu seluas 30 ha dengan jumlah produksi 33 ton dan produksi rata-rata 11,07 ton/ha
- **Kacang Hijau**

Luas panen kacang hijau menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 727 ha dengan jumlah produksi 762 ton dan produksi rata-rata 10,48 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kabupaten Nabire, yaitu seluas 117 ha dengan jumlah produksi 119 ton dan produksi rata-rata 10,19 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Yahukimo, yaitu seluas 9 ha dengan jumlah produksi 10 ton dan produksi rata-rata 10,95 ton/ha. Secara keseluruhan pada tahun 2010 adalah 757 ha dengan jumlah produksi 800 ton dan produksi rata-rata 10,57 ton/ha.
- **Ubi jalar**

Luas panen ubi jalar menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2011 adalah 34.413 ha dengan jumlah produksi 348.438 ton dan produksi rata-rata 101,25 ton/ha. Luas panen terluas terdapat di Kabupaten Jayapura, yaitu seluas 13.668 ha dengan jumlah produksi 138.754 ton dan produksi rata-rata 101,52 ton/ha. Sedangkan luas panen terkecil terdapat di Kabupaten Asmat, yaitu seluas 36 ha dengan jumlah produksi 360 ton dan produksi rata-rata 99,97 ton/ha. Secara keseluruhan pada tahun 2010 adalah 34.670 ha dengan jumlah produksi 349.135 ton dan produksi rata-rata 100,70 ton/ha

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Sayur Menurut Jenis Tanaman

Jenis sayur yang memiliki luas panen terluas adalah sayur petsai/sawi, dengan luas panen 959 ha, jumlah produksi 4.224 ton dan rata-rata produksi 44,05 ton/ha. Sedangkan jenis sayuran yang memiliki luas panen terkecil adalah jenis bawang putih, dengan luas panen 19 ha dan jumlah produksi 49 ton serta rata-rata produksi 25,53 ton/ha. Luas Panen, produksi dan rata-rata produksi sayur menurut jenis tanaman disajikan pada Tabel 2.21.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.21. Luas Panen, produksi dan rata-rata produksi sayur menurut jenis tanaman

Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Rata-rata Produksi
Bawang Merah	143	680	47,52
Bawang Putih	19	49	25,53
Bawang Daun	330	937	28,39
Kentang	35	110	31,29
Kubis	533	2 601	48,80
Kembang Kol	60	110	18,25
Petsai/Sawi	959	4 224	44,05
Wortel	60	166	27,67
Lobak	-	-	-
Kacang Merah	34	145	42,65
Kacang Panjang	921	4 996	54,25
Cabe Rawit	617	3 632	58,86
Cabe Besar	756	4 033	53,35
Tomat	798	5 881	73,69
Terung	635	5 305	83,55
Buncis	619	2 981	48,16
Ketimun	547	4 133	75,56
Labu Siam	201	1 407	70,02
Kangkung	928	4 285	46,17
Bayam	767	2 353	30,68
Melinjo	147	6	0,41
Petai ^{*)}	166	9	0,54
Jengkol ^{*)}	20	1	0,45

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, 2012.

Keterangan : ^{*)} Luas Panen dalam satuan pohon

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman

Jenis buah yang memiliki luas panen terluas adalah buah jeruk siam, dengan luas panen 218.943 ha dan jumlah produksi 9.246 ton serta rata-rata produksi 42,23 ton/ha. Sedangkan jenis buah yang memiliki luas panen terkecil adalah jenis manggis, dengan luas panen 7 ha dan jumlah produksi 1 ton serta rata-rata produksi 85,71 ton/ha. Luas Panen, produksi dan rata-rata produksi buah-buahan menurut jenis tanaman disajikan pada Tabel 2.22.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.22. Luas Panen, produksi dan rata-rata produksi buah-buahan menurut jenis tanaman

Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Rata-rata Produksi
Alvokad	6 198	316	50,92
Belimbing	1 824	129	70,50
Duku,Langsat, Kokosan	9 981	512	51,34
Durian	47 499	2 167	45,61
Jambu Biji	4 422	159	35,93
Jambu Air	9 036	212	23,51
Jeruk Siam	943	9 246	42,23
Jeruk Besar	11 499	630	54,80
Mangga	25 451	1 451	57,02
Manggis	7	1	85,71
Nangka/Cempedak	16 282	997	61,25
Nenas*)	67 085	237	3,53
Pepaya	43 818	1 629	37,19
Pisang*)	150481	6 677	44,37
Rambutan	47 761	1 414	29,60
Salak*)	39 918	273	6,84
Sawo	45	3	71,11
Markisa	928	4	4,74
Sirsak	3 193	76	23,68
Sukun	2 545	177	69,39
Melon**)	108	1 038	9 613,89
Semangka	304	3 353	11 030,26

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, 2012

Keterangan : *) :Luas Panen dalam Satuan Rumpun

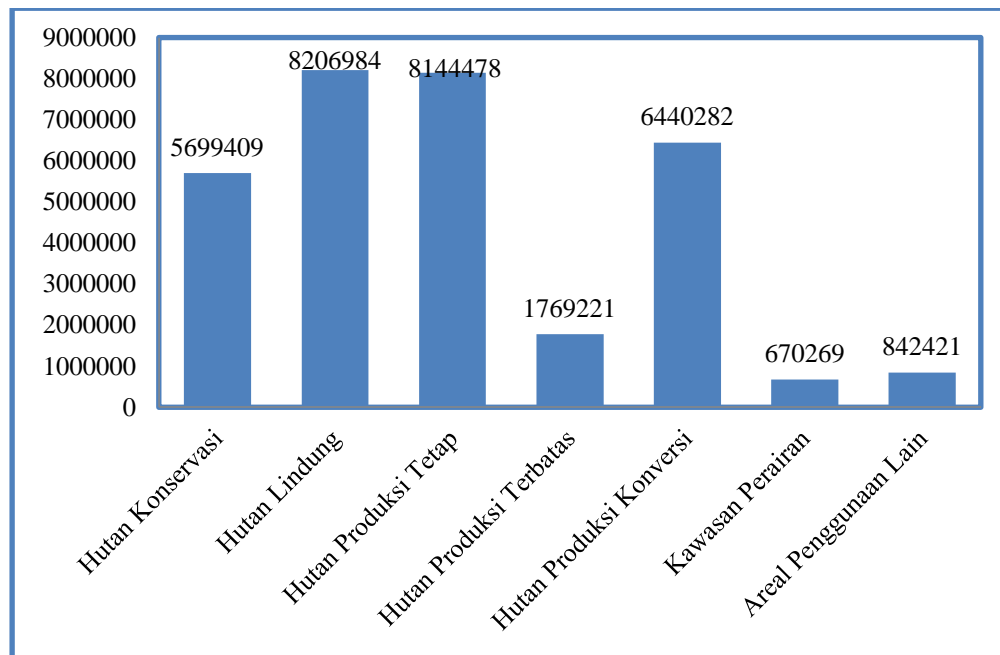
**) :Luas Panen dalam Satuan Ha

2. Kehutanan

Kondisi umum kawasan hutan Provinsi Papua

Kawasan Hutan di Provinsi Papua ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan paduserasi TGHK-RTRWP, kawasan hutan di Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan seluas 42.224.840 hektar. Pembagian kawasan hutan menurut fungsi disajikan pada Gambar 2.2.

LAPORAN AKHIR



Gambar 2.2. Grafik luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan fungsi hutan di Provinsi Papua

Peningkatan kebutuhan manusia akan hasil hutan mendorong peningkatan kegiatan eksploitasi hutan. Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Papua melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) telah berlangsung sejak tahun 1970an dan hingga sekarang areal hutan produksi (HP, HPT dan HPK) yang telah dibebani hak IUPHHK seluas 4.387.508 ha yang tersebar di 17 kabupaten. Areal konsesi IUPHHK ini potensial menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan merupakan sumber emisi bila pengawasan terhadap implementasi system silvikultur dan tata kelola usaha tidak dilakukan secara intensif.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.23. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN / PEMEGANG IUPHHK	SK HPH / IUPHHK			KETERANGAN
		NOMOR	TGL	LUAS (HA)	
1	2	3	4	5	7
I.	KAB JAYAPURA DAN KABUPATEN SARMI				
1	PT. Tunggal Yudhi Unit I (Jpr)	489/Kpts-II/95	14 Sep 95	69,400	Stagnasi sejak 2003
	JUMLAH I			69,400	
II	KABUPATEN KEEROM				
2	PT. Batasan	342/Kpts-II/97	01 Jun 97	106,643	Aktif
3	PT. Hanurata Coy. Ltd Jayapura	601/Menhut-II/2012	30 Oktober 2012	56,325	SK PERPANJANGAN IUPHHK
	JUMLAH II			162,968	
III.	KABUPATEN SARMI				
4	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II	723/Menhut-II/2011	12/20/2011	169,170	Aktif
5	PT. Bina Balantak Utama	SK. 365/Menhut-II/2011	07 Juli 2011	298,710	Aktif
6	PT. Mondialindo Setya Pratama	SK.466/MENHUT-II/2006	19 Sept 2006	94,800	Aktif
7	PT. Sumber Mitra Jaya Unit II	SK.556/MENHUT-II/2006	22 Des 2006	52,160	Aktif
8	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	SK. 396/Menhut-II/2006	17 Juli 2006	79,130	Aktif
	JUMLAH III			693,970	
IV	KABUPATEN SARMI DAN JAYAPURA				
9	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	334/Menhut-II/2009	15 Januari 2009	103,510	Aktif
10	PT. Sumber Mitra Jaya Unit I	SK.396/MENHUT-II/2005	23 Nop 05	102,250	Aktif
	JUMLAH IV			205,760	
V	KABUPATEN WAROPEN				
11	PT. Irmasilindo Unit Serui	04/Kpts-II/2001	11 Jan 01	174,540	Aktif
	JUMLAH V			174,540	
VI	KABUPATEN WAROPEN, PANIAI DAN MAMBERAMO RAYA				
12	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit III	169/Kpts-II/97	25 Mar 97	407,350	Aktif
	JUMLAH VI			407,350	
VII	KABUPATEN NABIRE				
13	PT. Jati Dharma Indah PI	96/Kpts-II/97	31 Jan 97	163,930	Aktif
	JUMLAH VII			163,930	
VIII	KABUPATEN MIMIKA				
14	PT. Diadyani Timber	SK.292/MENHUT-II/09	18 Mei 2009	205,160	Aktif
15	PT. Alas Tirta Kencana	649/Kpts-II/95	30 Nop 95	87,500	Aktif
	JUMLAH VIII			292,660	
IX	KABUPATEN ASMAT, YAHUKIMO DAN MAPPI				
16	PT. Kayu Pusaka Bumi Makmur	70/Kpts-II/96	26 Feb 96	171,100	Stagnasi Sejak 2011
	JUMLAH IX			171,100	
X	KABUPATEN MAPPI DAN BOVEN DIGOEL				
17	PT. Mukti Artha Yoga	SK.57/MENHUT-II/2007	22 Feb 2007	151,690	Mengurus RKU Basis IHMB di Pusat
	JUMLAH X			151,690	
XI	KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN PEG. BINTANG				
18	PT. Tunggal Yudhi Unit II (Mrk)	489/Kpts-II/95	14 Sep 95	203,600	Stagnasi sejak 2002
	JUMLAH XI			203,600	
XII	KABUPATEN BOVEN DIGOEL				
19	PT. Dharmali Mahkota Timber	248/Kpts-II/94	07 Jun 94	156,800	Stagnasi
20	PT. Tunas Sawaerma/Tunas Timber Lestari	SK.101/Menhut-II/2009	12 Maret 2009	214,935	Aktif
21	PT. Digul Daya Sakti Unit I	614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997	15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997	344,800	Pelaksanaan IHMB
22	PT. Digul Daya Sakti Unit II	614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997	15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997	103,200	Pelaksanaan IHMB
	JUMLAH XII			819,735	
XIII	KABUPATEN YAHUKIMO, MAPPI & BOVEN DIGOEL				
23	PT. Rimba Megah Lestari	303/Kpts-II/96	18 Jun 96	250,000	Stagnasi 2008
	JUMLAH XIII			250,000	
XIV	KABUPATEN YAHUKIMO, ASMAT & NDUGA				
24	PT. Global Partner Indonesia	SK.39/Menhut-II/2009	09 Pebruari 2009	144,940	Belum Beroperasi
	JUMLAH XIV			144,940	
XVI	KABUPATEN MERAUKE DAN BOVEN DIGOEL				
25	PT. Merauke Rayon Jaya	05/Kpts-II/98 Jo SK.251/Menhut-II/08	1 Juli 2008	206,800	Belum Beroperasi
	JUMLAH XVI			206,800	
XVII	KABUPATEN MERAUKE				
26	PT. Selaras Inti Semesta	SK.18/Menhut-II/2009	22 Januari 2009	169,400	Aktif
27	PT. Inocin Abadi	SK. 606/Menhut-II/2011	21 Oktober 2011	99,665	Aktif
	JUMLAH XVII			269,065	
	TOTAL			4,387,508	

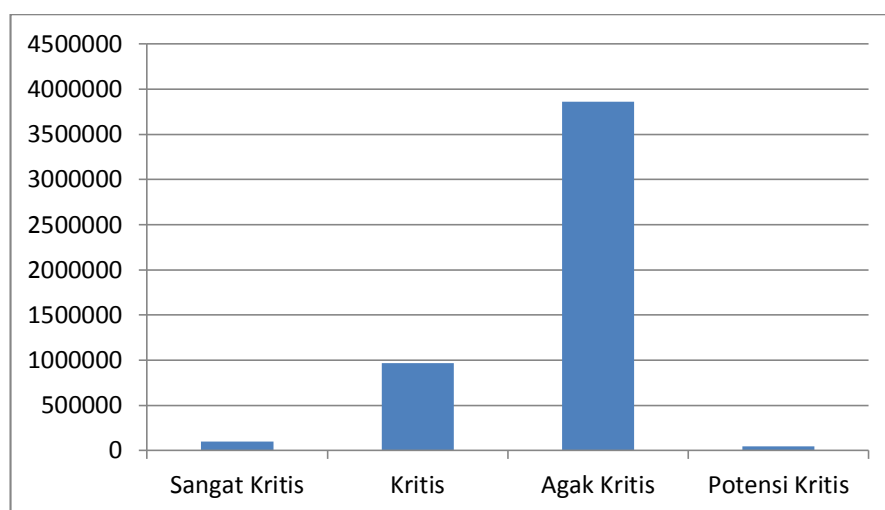
Sumber: Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2012

LAPORAN AKHIR

Luas hutan Papua sesuai perhitungan terakhir seluas 31.228.696 Ha. Apabila Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang susun (*overlay*) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan (RTRWP) terhadap maka akan dijumpai fakta sebagai berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK berkurang 2.847.146 ha (-43.9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (+237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (+4.4%). Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang konservatif dan berwawasan lingkungan. Namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk fungsi produksi dan hutan produksi konversi masih perlu diperdebatkan. Karena kebutuhan pembangunan yang bersumber dari hasil hutan dan lahan untuk kepentingan infrastruktur wilayah semakin hari semakin meningkat, sedangkan ketersediaan areal hutan untuk produksi dan untuk di konversi kemungkinan tidak mampu mengimbangi tuntutan peningkatan kebutuhan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Deforestasi dan Degradasi Hutan

Menurut data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Tahun 2010 menunjukkan bahwa angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 169.100 hektar/tahun. Selanjutnya menurut sumber yang sama bahwa lahan kritis di Provinsi Papua mencapai 4.976.051 hektar. Tingkat kekritisannya kawasan hutan di Provinsi Papua sebagaimana terlihat pada histogram pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Kondisi lahan kritis menurut tingkat kekritisannya di Provinsi Papua, 2010

LAPORAN AKHIR

Sebaran luas lahan tidak produktif di masing-masing kabupaten menurut tingkat kekristisan lahan di Provinsi Papua seperti di sajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi kawasan hutan dan tingkat kekristisan di Provinsi Papua

No	Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)				Jumlah
		SK	K	AK	PK	
1	KSA/KPA	25,383	97,511	839,451		962,345
2	HL	39,693	412,255	349,712	365	802,025
3	HPT	5,538	29,078	35,537	1,465	71,618
4	HP	6,175	78,490	1,234,760	3,930	1,323,355
5	HPK	23,687	297,704	1,154,853	5,776	1,482,020
6	APL	2,129	53,814	244,759	33,883	334,585
Jumlah		102,605	968,852	3,859,072	45,419	4,975,948

Keterangan : Sk = sangat kritis; K = kritis; AK = agak kritis; PK = potensial kritis Sumber : Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Mamberamo, 2011.

Tabel 2.24 memperlihatkan bahwa luas lahan kritis yang berada di dalam kawasan suaka alam/pelestarian alam (KSA/KPA) dan Hutan Lindung (HL) masing-masing 962.345 ha dan 802,025 ha. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kegiatan perambahan dalam kawasan yang seharusnya harus tetap dikonservasi. Kegiatan perambahan ini terjadi selain sebagai akibat adanya pemekaran wilayah kabupaten pada kawasan tersebut, tetapi juga diduga kegiatan pengelolaan yang belum intensif. Banyak faktor utama yang berperan dalam pembentukan lahan-lahan kritis tersebut yang perlu diidentifikasi sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat mengatasinya.

Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten di Provinsi Papua seperti disajikan pada Tabel 2.25.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.25. Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten/kota dan tingkat kekritisannya di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)				
		SK	K	AK	PK	Jumlah
1	Merauke	487	29,105	2,389,672		2,419,264
2	Jayawijaya	2,478	54,951	53,818		111,247
3	Jayapura	7,408	21,729	28,904	14,224	72,265
4	Nabire	11,184	31,923	54,934	1,886	99,927
5	Yapen	1,123	8,695	5,306		15,124
6	Biak	3,391	18,123	37,918	531	59,963
7	Paniai	4,230	38,988	21,072		64,290
8	Puncak Jaya	2,327	42,303	10,123		54,753
9	Mimika	13,300	22,364	22,797		58,461
10	Boven Digoel	170	7,078	164,520	19,257	191,025
11	Mappi	306	61,601	655,205	1,973	719,085
12	Asmat		714	79,543		80,257
13	Yahukimo	15,123	171,486	15,991		202,600
14	Pegunungan Bintang	2,025	105,343	15,086		122,454
15	Tolikara	595	56,065	27,210		83,870
16	Sarmi	161	2,967	23,471		26,599
17	Keerom	129	3,708	26,165	7,466	37,468
18	Waropen	158	20,186	42,168	82	62,594
19	Supiori	48	1,477	4,571		6,096
20	Mamberamo Raya	833	16,972	89,527		107,332
21	Nduga	677	23,558	1,726		25,961
22	Lanny Jaya	194	53,130	12,054		65,378
23	Mamberamo Tengah	57	26,059	13,922		40,038
24	Yalimo	584	21,512	8,587		30,683
25	Puncak	21,371	31,835	15,856		69,062
26	Dogiyai	4,220	29,871	19,685		53,776
27	Intan Jaya	8,624	56,147	8,517		73,288
28	Deiyai	881	2,439	344		3,664
29	Kota Jayapura	522	8,522	10,381		19,425
	Jumlah	102,606	968,851	3,859,073	45,419	4,975,949

Keterangan : Sk = sangat kritis; K = kritis; AK = agak kritis; PK = potensial kritis

Sumber : Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Mamberamo, 2011.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua, sampai dengan tahun 2011 pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) sebanyak 11 unit terdiri dari 7 unit CA. Disamping itu juga di Provinsi Papua terdapat Kawasan Pelestarian Alam sebanyak 2 unit yaitu Taman

LAPORAN AKHIR

Nasional Lorentz dan Taman Nasional Wasur. Komposisi luas Kawasan konservasi di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Komposisi luas Kawasan konservasi di Provinsi Papua

No	Kawasan Konservasi	Luas (Ha)
1.	Taman Nasional	
	a. Lorentz	2.505.600
	b. Wasur	413.810
2.	Cagar Alam	
	a. Pegunungan Cycloop	22.500
	b. Pegunungan Wayland	128.220,23
	c. Bupul	92.000
	d. Yapen Tengah	119.000
	e. Biak Utara	6.138,04
	f. Pulau Supiori	41.990
	g. Tanjung Wiay	4.378,70
3.	Suaka Margasatwa	
	a. Danau Bian	100.000
	b. Pulau Dolok	664.627,97
	c. Pulau Pombo	100
	d. Pulau Savan	8.260
	e. Pulau Komolom	84.000
	f. Mamberamo Foja	2.018.300
	g. Jayawijaya	800.00
4.	Taman Wisata Alam	
	a. Teluk Youtefa	1.675
	b. Nabire	100
	Jumlah	6.211.688

Sumber : Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

Secara umum deforestasi dapat diklasifikasikan menjadi deforestasi terencana dan tidak terencana. Berkurangnya luas kawasan hutan untuk keperluan penggunaan lahan non-hutan dikelompokkan kedalam “deforestasi terencana”. Deforestasi terencana ini bisa disebabkan oleh konversi hutan sebagai akibat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konversi untuk keperluan perizinan untuk penggunaan lahan di luar kehutanan seperti perkebunan, dan pertambangan. Dalam kawasan hutan, pembukaan hutan tidak terencana dan degradasi dipicu oleh: (i) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan; (ii) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan; dan (iii) penegakan peraturan pengelolaan hutan yang lemah.

LAPORAN AKHIR

Meningkatnya laju deforestasi hutan di Papua saat ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya usaha penebangan liar (illegal logging) baik yang dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan maupun oleh masyarakat, minimnya kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH), konversi sumberdaya hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan transmigrasi, kebakaran hutan serta tidak adanya pengakuan dan kepastian hak penguasaan akan sumberdaya lahan dan hutan (*land tenure right*) bagi masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan konflik sosial. Penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pemekaran wilayah (Kabupaten/kota) yang kemudian diikuti oleh pemekaran distrik dan kampung juga memberi dampak pada deforestasi dan degradasi hutan. Hal tersebut sangat relevan, jika mengacu pada data RTRW Provinsi Papua yang secara teknis telah disahkan Menteri Kehutanan tahun 2012, tampak bahwa hampir 80% sebaran kampung di Papua berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- a. Kegiatan Optimalisasi PNBP
- b. Pembangunan dan Pengembangan Industri Kayu Rakyat
 - Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Areal Kerja (PAK) pada HPH/IUPHHK
 - Penyelenggaraan Promosi Investasi dan Kerjasama Perdagangan.
 - Pembinaan Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan bagi Aparatur Kehutanan dan Pemegang Ijin HPH/IUPHHK
 - Kegiatan Pengembangan hutan rakyat
 - Pengembangan Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pal Batas IUPHHK di Provinsi Papua
 - Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Hasil hutan
 - Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan

LAPORAN AKHIR

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Pembangunan dan pengembangan jenis tegakan endemik potensi Papua
- Pengembangan aneka usaha kehutanan
- Pengelolaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Papua
- Pengelolaan Kawasan Lindung Danau Tigi Taga Enarotali.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak Numfor
- Rehabilitasi Kawasan Konservasi Cagar Alam Cycloop
- Kegiatan Pembentukan Kelompok Pencinta alam dan Pelestari Lingkungan
- Pengelolaan Balai Kebun Botani Kehutanan Papua.
- Kegiatan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah I Jayapura
- Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah II Serui
- Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah III di Wamena
- Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah IV di Merauke

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Kegiatan Optimalisasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu dilaksanakan dengan tujuan tertib administrasi industri primer hasil huta di lapangan dan meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat adat. Melalui Kegiatan ini dilakukan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan di 9 Kabupaten. Adapun manfaat dari kegiatan ini dengan terkendalinya bahan baku dan produk industri hasil hutan dan mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

- Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Papua
- Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi Hutan

LAPORAN AKHIR

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- Pengembangan Regulasi di Bidang Kehutanan
- Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan
- Pembinaan Wilayah Pembangunan Kehutanan
- Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Aparatur Kehutanan
- Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Kehutanan bagi Masyarakat Adat

Perkebunan

Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat

- Perkebunan Kelapa Dalam

Luas tanaman perkebunan kelapa dalam di Provinsi Papua adalah 25.613 ha dengan jumlah produksi 9.870 ton dengan jumlah petani 35.389 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan kelapa dalam terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 5.999 ha dan jumlah produksi 4.000 ton. Sedangkan luas perkebunan kelapa dalam terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Tolikara dengan luasan 6 ha dan jumlah produksi 1 ton.

- Perkebunan Kelapa Sawit

Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua adalah 9.818 ha dengan jumlah produksi 16.135 ton yang melibatkan petani sebanyak 11.234 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan kelapa sawit terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Keerom dengan luasan 9.300 ha dan jumlah produksi 15.061 ton. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 518 ha dan jumlah produksi 1.074 ton.

- Perkebunan Kopi

Luas tanaman perkebunan kopi di Provinsi Papua adalah 7.041 ha dengan jumlah produksi 1.360 ton yang melibatkan 11.195 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan kelapa dalam terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Merauke dengan luasan

LAPORAN AKHIR

5.999 ha dan jumlah produksi 4.000 ton. Sedangkan luas perkebunan kopi terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Tolikara dengan luasan 6 ha dan jumlah produksi 1 ton.

- Perkebunan Kelapa Hibrida

Luas tanaman perkebunan kelapa hibrida di Provinsi Papua adalah 121 ha dengan jumlah produksi 33 ton dimana jumlah petani adalah 278 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan kelapa hibrida terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Nabire dengan luasan 74 ha dan jumlah produksi 16 ton. Sedangkan luas perkebunan kelapa hibrida terkecil adalah Kabupaten Jayapura dengan luasan 10 ha dan jumlah produksi 7 ton.

- Perkebunan Coklat

Luas tanaman perkebunan coklat di Provinsi Papua adalah 30.508 ha dengan jumlah produksi 12.897 ton, dimana jumlah petani adalah 23.776 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan coklat terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Jayapura dengan luasan 14.342 ha dan jumlah produksi 5.171 ton. Sedangkan luas perkebunan coklat terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Asmat dengan luasan 3 ha tanpa adanya produksi.

- Perkebunan Cengkeh

Luas tanaman perkebunan cengkeh di Provinsi Papua adalah 2.253 ha dengan jumlah produksi 69 ton dengan jumlah petani 3.383 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan cengkeh terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Jayapura dengan luasan 1.211 ha dan jumlah produksi 23 ton. Sedangkan luas perkebunan cengkeh terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Supiori dengan luasan 10 ha dengan jumlah produksi 2 ton. Kemudian disusul Kabupaten dengan jumlah produksi yang sama, yaitu 2 ton namun memiliki luasan yang lebih luas dari Kabupaten Supiori, yaitu 14 ha.

LAPORAN AKHIR

- Perkebunan Karet

Luas tanaman perkebunan karet di Provinsi Papua adalah 4.682 ha dengan jumlah produksi 1.531 ton dengan petani sebanyak 6.881 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan karet terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Mappi dengan luasan 2.997 ha dan jumlah produksi 1.148 ton. Sedangkan luas perkebunan karet terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 367 ha dengan jumlah produksi 80 ton.

- Perkebunan Jambu Mete

Luas tanaman perkebunan jambu mete di Provinsi Papua adalah 3.356 ha dengan jumlah produksi 509 ton dengan petani sebanyak berjumlah 7.568 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan jambu mete terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 2.152 ha dan jumlah produksi 350 ton. Sedangkan luas perkebunan jambu mete terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Biak Numfor dengan luasan 35 ha dengan jumlah produksi 1 ton.

- Perkebunan Lada

Luas tanaman perkebunan lada di Provinsi Papua adalah 41,06 ha dengan jumlah produksi 9 ton dengan petani berjumlah 154 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan lada terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Waropen dengan luasan 20 ha dan jumlah produksi 5 ton. Sedangkan luas perkebunan lada terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan luasan 0,06 ha dengan jumlah produksi 0 ton.

- Kapok Randu

Luas tanaman perkebunan kapok randu di Provinsi Papua adalah 737 ha dengan jumlah produksi 64 ton dimana jumlah petani sebanyak 5.998 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk

LAPORAN AKHIR

perkebunan kapok randu terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 561 ha dan jumlah produksi 62 ton. Sedangkan luas perkebunan kapok randu terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Biak Numfor dengan luasan 3 ha dengan jumlah produksi 0 ton.

- Vanili

Luas tanaman perkebunan vanili di Provinsi Papua adalah 341 ha dengan jumlah produksi 1,20 ton dengan petani berjumlah 490 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan vanili terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Waropen dengan luasan 202 ha dan jumlah produksi 1 ton. Sedangkan luas perkebunan vanili terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Mimika dengan luasan 1 ha dengan jumlah produksi 0 ton. Terdapat beberapa Kabupaten yang memiliki perkebunan vanili yang luas namun tidak berproduksi, yaitu Kabupaten Jayapura (19,15 ha), Kabupaten Nabire (2 ha), Kepulauan Yapen (11 ha) Kabupaten Biak Numfor (11 ha), Kabupaten Yahukimo (7 ha), Kabupaten Pegunungan Bintang (15 ha), Kabupaten Tolikara (17 ha), Kabupaten Keerom (43 ha), dan Kabupaten Supiori 2 ha.

- Jarak Pagar

Luas tanaman perkebunan jarak pagar di Provinsi Papua adalah 467 ha dengan jumlah produksi 4 ton dengan petani berjumlah 540 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan jarak pagar terluas adalah Kabupaten Biak Numfor dengan luasan 269 ha, namun tidak berproduksi. Sedangkan luas perkebunan jarak pagar terkecil dan berproduksi adalah Kabupaten Merauke dengan luasan 198 ha dengan jumlah produksi 4 ton.

- Pinang

Luas tanaman perkebunan pinang di Provinsi Papua adalah 1.653 ha dengan jumlah produksi 350 ton dengan petani berjumlah 5.407 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan pinang terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Keerom dengan luasan 1.074 ha dan jumlah produksi 233 ton. Sedangkan luas perkebunan

LAPORAN AKHIR

pinang terkecil Kabupaten Mimika dengan luasan 4 ha dengan jumlah produksi 0 ton. Selain Kabupaten Mimika, terdapat Kabupaten yang memiliki lahan perkebunan pinang yang luas, namun tidak berproduksi, yaitu Kabupaten Merauke (24 ha) dan Kabupaten Tolikara (6 ha).

- Sagu

Luas tanaman perkebunan sagu di Provinsi Papua adalah 458 ha dengan jumlah produksi 10 ton dengan jumlah petani sebanyak 1.360 orang. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk perkebunan sagu terluas dan jumlah produksi tertinggi adalah Kabupaten Biak Numfor dengan luasan 162 ha dan jumlah produksi 32 ton. Sedangkan luas perkebunan sagu terkecil dan jumlah produksi terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan luasan 50 ha dengan jumlah produksi 0 ton.

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman

Luas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman di Provinsi Papua secara keseluruhan adalah 64.794 ha. Dimana, luas tanaman perkebunan jenis coklat memiliki lahan terluas, yaitu 30.508 ha dengan jumlah produksi 12.897, rata-rata produksi 895 ton/ha dan jumlah petani 23.776 orang. Sedangkan luas tanaman perkebunan jenis kelapa hibrida memiliki lahan terkecil, yaitu 121 ha dengan jumlah produksi 33, rata-rata produksi 327 ton/ha dan jumlah petani 278 orang. Secara lengkap luas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman disajikan pada Tabel 2.27.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.27. Luas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman

Jenis Tanaman	Luas Tanaman	Produksi	Produksi Rata-Rata	Jumlah Petani
Karet	4.682	1.531	365	6.881
Kelapa Sawit	5.830	39.604	7.334	11.234
Kopi	7.041	1.360	471	11.195
Kelapa Dalam	7.306	12.658	2.661	35.389
Coklat	30.508	12.897	895	23.776
Cengkeh	2.253	69	46	3.383
Kelapa Hibrida	121	33	327	278
Jarak	467	4	25	547
Lada	41	9	237	154
Kapok Randu	737	64	91	5.998
Vanili	341	1	9	490
Jambu Mete	3.356	509	195	7.568
Pinang	1.653	350	291	5.407
Sagu	458	106	373	1.360
Jumlah	64.794	69.195	1.803	113.660

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, 2010

Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Pengusahaan

Jenis pengusahaan perkebunan di Provinsi Papua dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pengusahaan, yaitu jenis pengusahaan rakyat, negara dan swasta, dengan luas dan produksi yang berbeda-beda. Luas areal untuk jenis pengusahaan oleh negara merupakan pengusahaan perkebunan rakyat terkecil, yaitu 10.300 ha dengan persentase 5,07% dan jumlah produksi 29.200 ton dengan persentase 26,99%. Selanjutnya disusul oleh pengusahaan oleh swasta, yaitu 33.250 ha dengan persentase 26,04% dan jumlah produksi 32.379 ton dengan persentase 29,93%. Sedangkan luas areal perkebunan untuk pengusahaan oleh rakyat lebih besar, yaitu 84.155 ha dengan dengan persentase 65,90% dan jumlah produksi 46.599 ton dengan persentase 43,08%. Luas areal perkebunan menurut jenis pengusahaannya secara keseluruhan adalah 127.705 ha dan jumlah produksi 108.178 ton. Secara lengkap luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis pengusahaan disajikan pada Tabel 2.28.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.28. Luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis pengusahaan

Jenis Pengusahaan Perkebunan	Luas Areal		Produksi	
	Ha	%	Ton	%
Rakyat	84 155	65.90	46 599	43.08
Negara	10 300	5.07	29 200	26.99
Swasta	33 250	26.04	32 379	29.93
Jumlah	127 705	100.00	108 178	100.00

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, 2007

Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi dan Jenis Pengusahaan

Luas areal tanaman secara keseluruhan dari jenis tanaman komoditi di Provinsi Papua adalah 127.705 dengan jumlah produksi 46.599 ton. Dimana, jenis tanaman komoditi kelapa sawit memiliki luas areal terbesar, yaitu 52.868 ha dan jumlah produksi 17.447 ton. Sedangkan untuk tanaman komoditi yang memiliki luasan terkecil adalah jenis jambu mete, yaitu 3.331 ha dan jumlah produksi 487 ton. Secara lengkap luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut komoditi dan jenis pengusahaan disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29. Luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat menurut komoditi dan jenis pengusahaan

Jenis Tanaman	Luas Tanaman				Produksi			
	PR	PBN	PBS	Jumlah	PR	PBN	PBS	Jumlah
Kelapa Dalam	31.135			31.135	12.478			12.478
Kelapa Sawit	9.818	10.300	32.750	52.868	17.447	29.200	32.379	17.447
Kopi	9.067			9.067	2.627			2.627
Coklat	20.346		500	20.746	11.414			11.414
Karet	4.682			4.682	1.531			1.531
Jambu Mete	3.331			3.331	487			487
Lainnya	5.776			5.776	615			615
Jumlah	84.155	10.300	33.250	127 705	46.599	29.200	32.379	46.599

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, 2007

LAPORAN AKHIR

Pertambangan dan Penggalian

Struktur perekonomian Papua sampai saat ini didominasi oleh sektor pertambangan, terutama hasil pertambangan PT. Freeport dengan rata-rata *share* 60%. Selama tahun 2011, produksi penambangan tembaga dan emas PT. Freeport mencapai 54.644.462 ton. Bulan Januari dan November Tahun 2011 tidak ada produksi penambangan tembaga dan emas oleh PT. Freeport. Bulan Januari dan November Tahun 2011 tidak ada produksi sehingga rata-rata produksi perbulan sebesar 5.464.446,2 ton. Produksi pertambangan PT. Freeport menurut bulan selama Tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30. Produksi pertambangan PT. Freeport menurut bulan

Bulan	Bijih Diproses	Kadar Tembaga Diproses	Kadar Tembaga Diproses	Σ Produksi Konsentrat	Kadar Tembaga	Kadar Emas
Januari	6.442.116	0,80	1,14	189.128	23,58	33,13
Februari	6.398.282	0,76	0,72	174.108	24,33	20,90
Maret	7.157.530	0,76	0,82	199.036	24,13	23,22
April	6.435.843	0,73	0,66	173.706	23,43	19,03
Mei	6.811.252	0,77	0,79	190.735	24,07	22,47
Juni	6.777.333	0,80	0,91	198.549	24,22	24,97
Juli	4.442.364	0,94	1,13	152.915	24,08	26,95
Agustus	6.413.445	0,96	1,24	235.248	23,16	28,21
September	3.150.628	0,75	0,99	90.430	23,16	28,21
Oktober	3.619.229	0,64	0,92	90.606	22,85	29,75
November	-	-	-	-	-	-
Desember	2.550.267	0,68	1,30	8.054	22,12	38,34

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua

3. Energi dan Transportasi

Energi

- *Bahan Bakar Minyak (BBM)*

Jumlah BBM yang disalurkan pada tahun 2011 secara umum naik dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2011, penyaluran premium sebesar 193.563 kilo liter (naik 18,18% dibanding tahun sebelumnya. Penyaluran minyak solar sebesar 70.241 kilo liter (naik 187,61% dibanding tahun 2010). Sedangkan penyaluran minyak tanah sebesar 67.751 kilo liter (naik 7,27% dibanding tahun sebelumnya). Historis jumlah pelanggan BBM sejak tahun 2008-2011 disajikan pada Tabel 2.31.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.31. Historis jumlah pelanggan BBM

Tahun	Jumlah Pelanggan	Avgas	Avtur	Premium	Minyak Tanah	Minyak Solar
2011	143		1.477.795	193.563	67.751	70.241
2010	211		78.384	163.790	63.158	49.889
2009	914	12	64.895	167.214	62.482	272.348
2008	348		12.698	147.742	62.746	242.978

BBM paling banyak disalurkan pada Bulan Maret (360.915 kilo liter atau 19,95% total penyaluran BBM selama tahun 2011). Sebaliknya pada Bulan Oktober, BBM yang disalurkan hanya sebanyak 2,32% terhadap total penyaluran BBM tahun 2011. Jumlah pelanggan dan penyalur bahan bakar minyak menurut jenis dan bulan selama Tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32. Jumlah pelanggan dan penyalur bahan bakar minyak menurut jenis dan bulan selama Tahun 2011

Bulan	Avtur (Kilo Liter)	Premium (Kilo Liter)	Minyak Tanah (Kilo Liter)	Minyak Solar (Kilo Liter)
Januari	183,220	15,571	5,839	4,729
Februari	175,942	14,269	5,455	4,389
Maret	334,118	15,829	5,513	5,455
April	159,960	15,305	5,476	5,353
Mei	139,147	15,999	5,501	6,044
Juni	197,271	15,615	5,575	6,037
Juli	27,978	15,958	5,455	6,237
Agustus	58,080	16,227	6,063	5,804
September	71,688	16,157	5,730	5,809
Oktober	12,825	16,956	5,518	6,704
November	42,046	17,235	5,667	6,744
Desember	75,521	18,442	5,959	6,936

Jumlah pelanggan BBM tertinggi menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat di Kabupaten Merauke, yaitu 23 pelanggan, dimana konsumsi avtur sebanyak 5.313 kilo liter, premium 21.276 kilo liter, minyak tanah 8.864 kilo liter dan minyak solar 11.729 kilo liter. Sebaliknya Jumlah pelanggan BBM terendah menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat di Kabupaten Tolikara, yaitu 1 pelanggan, dimana konsumsi premium sebanyak 40 kilo liter, kilo liter dan minyak solar 20 kilo liter. Kabupaten Dogiyai, dengan konsumsi minyak tanah sebanyak 55 kilo liter, Kabupaten Deiyai dengan konsumsi minyak tanah sebanyak 15 kilo liter.

LAPORAN AKHIR

Konsumsi avtur tertinggi adalah Kabupaten Biak Numfor, yaitu sebanyak 1.369.204 kilo liter. Sebaliknya konsumsi avtur terendah adalah Kabupaten Paniai, yaitu sebanyak 525 kilo liter. Konsumsi premium tertinggi adalah Kota Jayapura, yaitu sebanyak 53.385 kilo liter. Sebaliknya konsumsi premium terendah adalah Kabupaten Tolikara, yaitu sebanyak 40 kilo liter. Konsumsi minyak tanah tertinggi adalah Kabupaten Jayapura, yaitu sebanyak 14.625 kilo liter. Sebaliknya konsumsi minyak tanah terendah adalah Kabupaten Deiyai, yaitu sebanyak 15 kilo liter. Konsumsi minyak solar tertinggi adalah Kota Jayapura, yaitu sebanyak 17.280 kilo liter. Sebaliknya konsumsi minyak solar terendah adalah Kabupaten Tolikara, yaitu sebanyak 20 kilo liter.

- *Listrik*

Jumlah pelanggan listrik PLN di Papua pada tahun 2011 naik 8,93 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 147.671 pada tahun 2010 menjadi 160.865 pelanggan tahun 2011. Tenaga listrik yang diproduksi PLN selama 2010 mencapai 527.030.748 KWH (naik 2,67 persen dibanding tahun 2009).

Jumlah produksi listrik yang dijual selama tahun 2010 mencapai 452.559.383 KWH, meningkat 5,4 persen dibanding 2009. Energi listrik yang terjual tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga sekitar 53,39 persen. Konsumsi terbesar dan pelanggan terbanyak berada di Kota Jayapura.

Transportasi

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut kabupaten/kota dan jenis kendaraan pada tahun 2011 terbagi menjadi; mobil penumpang, bus, truck, mobil barang dan sepeda motor. Jumlah mobil penumpang tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu 16.676 mobil, sebaliknya jumlah mobil penumpang terendah terdapat pada Kabupaten Mappi, yaitu 7 mobil. Jumlah bus tertinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya, yaitu 1.070 bus, sebaliknya jumlah bus terendah terdapat pada Kepulauan Yapen, yaitu 21 bus. Jumlah truk tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu 3.129 truk, sebaliknya jumlah truk terendah terdapat pada Kabupaten Mappi, yaitu 2 truk. Jumlah mobil barang tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu 2.956 mobil barang, sebaliknya jumlah mobil barang terendah terdapat pada Kabupaten Boven Digoel, yaitu 7 mobil barang. Jumlah sepeda

LAPORAN AKHIR

motor tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu 94.039 sepeda motor, sebaliknya jumlah sepeda motor terendah terdapat pada Kabupaten Mappi, yaitu 261 sepeda motor.

Jumlah mobil penumpang mengalami peningkatan pada tahun 2010, dengan jumlah mobil penumpang sebanyak 37.330 mobil, bus meningkat pada tahun 2007, dengan jumlah bus sebanyak 8.949 bus, truk meningkat pada tahun 2008, dengan jumlah truk sebanyak 12.953 truk, mobil barang meningkat pada tahun 2011, dengan jumlah mobil barang sebanyak 13.646 mobil barang dan sepeda motor meningkat pada tahun 2006 dan 2010. Dengan jumlah sepeda motor sebanyak 300.260 sepeda motor. Historis transportasi menurut jenisnya di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Historis transportasi menurut jenisnya di Provinsi Papua

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Mobil Barang	Sepeda Motor
2011	35.533	2.490	7313	13.646	290.938
2010	37.330	4.455	10.153	8.889	300.260
2009	34.728	1.670	4.915	10.254	260.241
2008	30.778	664	12.953	2.122	199.740
2007	17.884	8.949		12.012	162.330
2006	37.330	4.455	10.153	8.889	300.260

4. Industri

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu industri besar industri sedang/menengah, industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar adalah industri yang memiliki 100 atau lebih tenaga kerja. Industri sedang/menengah adalah industri yang memiliki 20-99 tenaga kerja. Industri kecil adalah industri yang memiliki 5-19 tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang lebih lima tenaga kerja.

Jumlah industri di Papua pada tahun 2010 adalah 4.231 unit usaha, naik 8,46% disbanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3.901 unit usaha. Sebagian besar industri besar berada di Kota Jayapura (783 industri), Kabupaten Merauke (585 industri), Kabupaten Biak Numfor (584 industri) dan Kabupaten Nabire (527 industri). Seiring dengan kenaikan jumlah industri, jumlah tenaga kerja yang terserap juga naik dari 24.112 tenaga kerja pada tahun 2009 menjadi 26.747 tenaga kerja pada tahun 2010. Sedangkan nilai investasi di industri mencapai Rp. 1.318 triliun atau naik 3,2% disbanding tahun sebelumnya, nilai investasi terbesar berada di Kabupaten Merauke yang mencapai Rp.

LAPORAN AKHIR

902,36 milyar. Nilai produksi yang dihasilkan dari kegiatan industri di Papua mencapai Rp. 452,31 milyar naik 2,73%

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah industri besar dan sedang di Papua tercatat 80 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 10.042 orang. Nilai investasi Rp. 1,27 triliun dan nilai produksi Rp. 247,68 milyar. Jumlah industri besar dan sedang paling banyak terdapat di Kabupaten Mimika (16 unit usaha), sedangkan industri sedang dan besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling banyak nilai investasinya adalah industri besar dan sedang di Kabupaten Merauke, yaitu masing-masing 4.213 tenaga kerja dan Rp. 897,9 milyar. Nilai output industri besar dan sedang paling banyak juga dihasilkan di Kabupaten Merauke (Rp. 146,04 milyar).

Jumlah industri kecil juga mengalami kenaikan selama tahun 2010, yaitu sebesar 8,16% (3.838 unit usaha pada tahun 2009 menjadi 4.151 unit usaha pada tahun 2010), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.705 orang atau naik sebesar 9,13%. Nilai investasi yang pada industri kecil sebesar Rp. 47,91 milyar (naik 11,3%) dengan nilai produksi Rp. 120,04 milyar.

5. Sektor Pengelolaan Limbah/Sampah

Definisi Limbah dan Pengelolaan Limbah

Permasalahan limbah yang berasal dari berbagai aktifitas masyarakat dan industri di Provinsi Papua pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang penting akibat dari pertumbuhan daerah-daerah perkotaan baru akibat pemekaran wilayah. Pertambahan penduduk ada daerah perkotaan baru tersebut berkontribusi besar pada peningkatan limbah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat. Jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan ditentukan pola konsumsi masyarakat. Akibat peningkatan limbah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat tersebut berkontribusi terhadap emisi GRK yang dihasilkan. Emisi yang dihasilkan dari limbah menjadi penting karena tidak hanya terkait dengan lingkungan tetapi juga yang berhubungan dengan aspek kesehatan masyarakat.

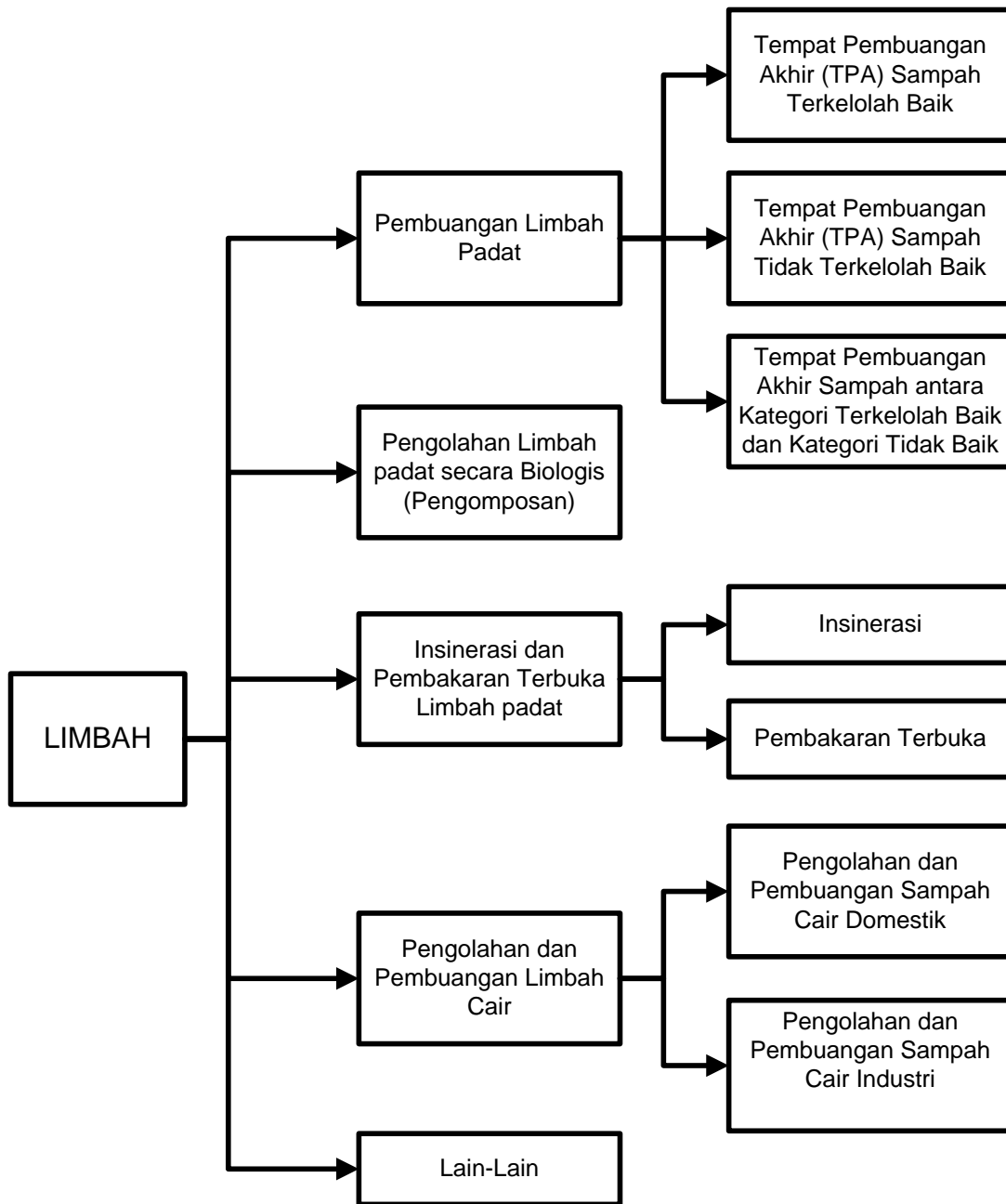
Limbah/sampah dapat didefinisikan sebagai buangan yang dihasilkan oleh aktifitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur (*sludge*), cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Walaupun dianggap sudah tidak berguna dan tidak dikehendaki, namun bahan tersebut kadang-kadang masih dapat dimanfaatkan kembali dan dijadikan bahan baku (Damanhuri dan Padmi, 2010). Dalam SNI 19-2454-2002 dijelaskan pengertian dari sampah perkotaan adalah

LAPORAN AKHIR

limbah yang bersifat padat baik yang terdiri atas bahan organik maupun anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan, yang timbul di kota. Sampah-sampah yang dihasilkan tersebut harus dikelola sehingga tidak berdampak pada penurunan mutu lingkungan hidup kita. Pengelolaan limbah rumah tangga dan sampah yang sejenis dari sumber berbeda terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemisahan dan pengelompokkan jenis sampah, pengangkutan dan pengumpulan sampah pada tempat penampungan dan pembuangan hingga melakukan proses pengembalian sampah atau residunya ke lingkungan secara aman. Namun dalam proses penanganan atau pengelolaan sampah domestik juga dapat menghasilkan emisi GRK antara lain seperti pembakaran sampah. Karena itu manajemen pengelolaan sampah yang dapat meminimumkan emisi GRK menjadi isu penting.

Dokumen RAD GRK Provinsi Papua untuk sektor limbah membahas mengenai sumber-sumber dan pengelolaan berbagai jenis limbah domestik daerah perkotaan yang berbentuk limbah padat maupun cair. Sampah domestik bersumber dari berbagai aktifitas masyarakat seperti limbah rumah tangga, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah sejenis dengan sampah rumah tangga. Kegiatan pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah tersebut diharapkan mengurangi emisi GRK.

IPCC Guidelines 2006GL menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) kategori emisi dari sektor limbah yaitu berasal dari sampah padat, padat olahan, pembakaran tertutup maupun terbuka, limbah cair olahan beserta buangnya. Struktur dan kategori emisi yang dihasilkan dari sektor limbah dalam IPCC Guidelines 2006 tersaji melalui Gambar 2.4. Emisi CH₄ dari pengolahan limbah padat merupakan sumber emisi GRK terbesar pada sektor limbah. Emisi CH₄ dari penanganan dan pembuangan limbah cair mungkin juga penting. Insinerasi dan pembakaran terbuka sampah yang mengandung carbon fosil seperti plastik, merupakan sumber yang paling penting dari emisi CO₂ dalam sektor limbah. CO₂ juga dihasilkan dalam pengelolaan sampah padat, penanganan limbah cair dan pembakaran limbah non-fosil.



Gambar 2.4. Struktur dan kategori emisi sektor limbah dalam IPCC Guidelines 2006GL

1) Limbah Padat Domestik

Sampah domestik menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah tersebut dapat berasal dari aktifitas rumah tangga, sampah sejenis dengan sampah rumah tangga dari aktifitas lain manusia, dan jenis sampah spesifik. Umumnya pengelolaan limbah di Provinsi Papua belum terkelolah secara baik. Namun demikian upaya untuk mengurangi

LAPORAN AKHIR

limbah padat tersebut telah dilakukan oleh pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Permasalahan Pengelolaan Sampah Domestik di Provinsi Papua yang dijabarkan ke dalam 5 aspek, yaitu :

- (1) Aspek Kebijakan
- (2) Aspek Kelembagaan
- (3) Aspek Teknik Operasional
- (4) Aspek Pembiayaan
- (5) Aspek Partisipasi Masyarakat dan Swasta

Uraian permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Papua untuk masing-masing aspek disajikan melalui Tabel 2.34.

Tabel 2.34. Permasalahan pengelolaan sampah domestik di Provinsi Papua

Aspek	Permasalahan
Aspek Kebijakan	Penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang belum optimal di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua
Aspek Kelembagaan	Kelembagaan khusus yang mempunyai tupoksi penanganan sampah di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua belum jelas
	Kompetensi sumberdaya manusia yang terlibat dalam penanganan sampah di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua belum merata
	Petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua
Aspek Teknik Operasional	Belum terakutnya semua sampah domestik ke tempat pembuangan sampah akhir seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua. Sebagian sampah tersebut ditangani secara langsung (<i>direct burning</i>) oleh masyarakat
	Sarana pengangkutan dan tempat pembuangan sampah di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua belum memadai jumlah dan luasannya
	Prospek usaha daur ulang sampah di Provinsi Papua masih rendah
	Kualitas pengelolaan sampah masih relatif rendah
Aspek Pembiayaan	Keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua untuk penanganan sampah.
Aspek Partisipasi Masyarakat dan Swasta	Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua masih relatif rendah
	Peran pihak swasta dalam mendukung program penanganan sampah masih relatif rendah